

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KUALITAS INFORMASI

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

(Studi pada Organisasi Perangkat Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta)



المعهد الإسلامي
الاسلامى
الاسلامى

SKRIPSI

Oleh :

Nama : Rachmat Nur Eka Pratama

NIM : 17312345

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KUALITAS INFORMASI

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

(Studi pada Organisasi Perangkat Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII.

Oleh :

Nama : Rachmat Nur Eka Pratama

No Mahasiswa : 17312345

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

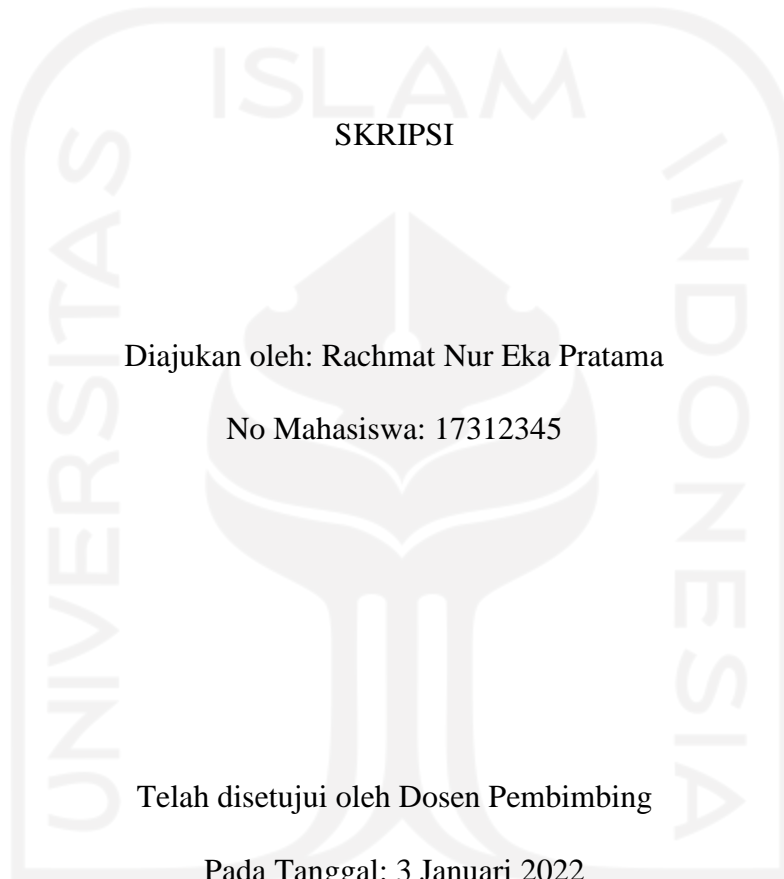
2022

HALAMAN PENGESAHAN

Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Informasi

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(Studi pada Organisasi Perangkat Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta)



Diajukan oleh: Rachmat Nur Eka Pratama

No Mahasiswa: 17312345

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal: 3 Januari 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Johan Arifin', is written over the bottom portion of the UII watermark logo.

(Johan Arifin, SE, M.Si, Ph.D., CFrA.)

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS INFORMASI LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Disusun oleh : RACHMAT NUR EKA PRATAMA

Nomor Mahasiswa : 17312345

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Rabu, 02 Februari 2022

Penguji/Pembimbing Skripsi : Johan Arifin, M.Si., Ph.D., CFra.

Penguji : Suwaldiman, M.Accy., Ak., CMA.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Dr. Jaka Sriyana, Dr., M.Si

MOTTO & PERSEMBAHAN

“Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”

(Qs. Al - Anfaal : 46)

“Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum kafir.”

(Qs. Yusuf : 87)

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang sabar.”

(Qs. Al – Baqarah : 153)

Skripsi ini aku persembahkan untuk Bapak dan Ibu tersayang
Hariyanta (Bapak) dan Yuni Astuti (Ibu)

“Bapak dan Ibu tersayang yang selalu mendoakan di setiap sholatnya dan selalu memberikan pengertian kepada anaknya hingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Mereka yang selalu bisa mendengarkan keluh kesah dari anaknya dan yang selalu memberikan semangat dirumah saat keadaan sering tidak mendukung serta orang yang selalu mendukung apapun yang anaknya butuhkan,”

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta dapat digunakan untuk kebaikan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil'aalamiin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, ridho, rizki dan karunia-Nya kepada penulis. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Skripsi dengan judul "Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah" dapat terselesaikan yang merupakan salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar sarjana (S1) akuntansi pada Prodi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak lepas dari banyaknya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan petunjuk, karunia-Nya dan kenikmatan yang melimpah serta telah memberikan kekuatan, kesabaran serta kelancaran hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW, sholawat serta salam kita sampaikan.
3. Bapak Hariyanto dan Ibu Yuni Astuti yang telah menjadi orangtua yang sudah mengorbankan banyak hal secara moral maupun material kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S1 di UII. Terimakasih atas jasa yang tidak mungkin bisa dibalaskan dengan apapun dan terimakasih telah memahami penulis dengan sepenuh hati. Semoga diberikan kesehatan serta perlindungan dari Allah SWT.
4. Bapak Johan Arifin, SE, M.Si, Ph.D., CFrA. Selaku Dosen Pembimbing yang dalam kesibukannya telah memberikan bimbingan dan saran hingga skripsi ini selesai.

5. Seluruh Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya selama ini kepada penulis.
6. Anita Maharani selaku orang terdekat yang selalu menemani baik saat *down* dan saat senang. Orang yang selalu ada setiap saat apapun yang penulis butuhkan dan orang yang sangat berjasa dalam kehidupan penulis dalam memperkuat diri pada situasi apapun.
7. Amri dan Aziz selaku sahabat yang sudah bersama-sama sejak di bangku sekolah dasar hingga menemani penulis disatu kontrakan yang sama pada saat kuliah.
8. Iksan, Ibnu, Rama selaku sahabat penulis yang selalu meramaikan suasana.
9. Ara, Intan dan Intun yang merupakan sahabat seperjuangan dalam perkuliahan serta rekan belajar setiap hari pada saat ujian Komprehensif dan Skripsi.
10. Sahabat Departemen EO HMJA KOMISI FBE UII yang telah menjadi keluarga kedua dan yang menjadi tempat bercerita tentang keluh kesah berorganisasi.
11. Teman-teman HMJA KOMISI FBE UII yang sudah memberikan banyak pelajaran berharga tentang berorganisasi, kekeluargaan, kebersamaan serta mengajarkan bagaimana berkomunikasi dengan lebih baik.
12. Teman-teman event SAP dan FESKON yang sudah memberikan pengalaman kepanitian yang tidak terlupakan.
13. Teman-teman KKN Angkatan 61 Unit 17. Terimakasih atas pelajaran, pengalaman dan kebersamaanya.
14. Pegawai BKAD Kota Yogyakarta, BKAD Kabupaten Gunungkidul, BKAD Kabupaten, Bantul, BKAD Kabupaten Kulonprogo dan BKAD Kabupaten Sleman yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi responden dalam penelitian ini.

Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka semua

yang sudah berjasa dan secara sukarela mengorbankan waktu dan tenaganya untuk membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh.

Gunungkidul, 15 November 2021

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	2
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	3
MOTTO & PERSEMBAHAN	4
KATA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI	8
DAFTAR TABEL	10
DAFTAR LAMPIRAN	11
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	12
ABSTRAK	13
BAB I	14
1.1 Latar Belakang Penelitian	14
1.2 Rumusan Masalah	20
1.3 Tujuan Penelitian	20
1.4 Manfaat Penelitian	21
1.5 Sistematika Penulisan	22
BAB II	23
2.1 Landasan Teori	23
2.2 Penelitian Terdahulu	34
2.3 Hipotesis Penelitian	38
2.4. Kerangka Pemikiran	44
BAB III	45
3.1 Populasi Dan Sampel	45
3.2 VARIABEL PENELITIAN	46
3.3 Metode Penelitian	49
3.4 Teknik Analisis Data	50
3.5 Statistik Deskriptif	51
3.6 Uji Asumsi Klasik	52
3.7 Analisis Linear Berganda	53
BAB IV	56
4.1 Hasil Pengumpulan Data	56
4.2 Gambaran Umum Responden	57

4.3	Uji Data Penelitian	60
4.5	Analisis Regresi Berganda	66
4.6	Pembahasan	70
BAB V		77
5.1	Kesimpulan	77
5.2	Implikasi Penelitian	78
DAFTAR PUSTAKA		80
LAMPIRAN		85



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	38
Tabel 4.1 Penyebaran Kuesioner	58
Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	58
Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Usia	59
Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Pendidikan	60
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas	61
Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas	63
Tabel 4.7 Uji Normalitas	64
Tabel 4.8 Uji Multikolinearitas	65
Tabel 4.9 Uji Heteroskedastisitas	67
Tabel 4.10 Analisis Regresi Linear Berganda	68
Tabel 4.11 Uji t	70
Tabel 4.12 Koefisien Determinasi	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin dan Keterangan Penelitian	84
Lampiran 2 : Operasional Variabel	93
Lampiran 3 : Kuesioner	96
Lampiran 4 : Tabulasi Data	88
Lampiran 5 : Reliabilitas dan Validitas	90
Lampiran 6 : Uji Regresi	98
Lampiran 7 : Uji Normalitas	100
Lampiran 8 : Uji Heteroskedastisitas	101



PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARSIME

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam refrensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Gunungkidul, 12 Januari 2022

Penulis,



(Rachmat Nur Eka Pratama)

ABSTRAK

Laporan keuangan pemerintah daerah adalah salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah serta merupakan faktor penting dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah. Faktor-faktor yang diteliti di antaranya meliputi kualitas dari sumber daya manusia, teknologi informasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan sistem akuntansi pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian Kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan penyebaran kuesioner secara langsung kepada 89 responden yang merupakan pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang ada di kabupaten/kota Provinsi D.I. Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah metode *purpose sampling*. Data yang terkumpul, kemudian dianalisis dengan metode analisis regresi linear berganda. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan SPSS 25. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kata Kunci: Kualitas Laporan Keuangan, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Standar Akuntansi Pemerintah

Abstract

Local government financial reports are a form of government accountability and are an important factor in realizing public financial management accountability. This study aims to determine the factors that affect the quality of information on local government financial reports. The factors studied include the quality of human resources, information technology, government internal control systems, and government accounting systems. This research is a quantitative research. Data collection was carried out using direct questionnaires to 89 respondents who were employees of the Regional Finance and Assets Agency (BKAD) in the Regency/City of the Province of D.I. Yogyakarta.

The research method used is purpose sampling method. The collected data was then analyzed by using multiple linear regression analysis method. The analysis was carried out using SPSS 25. The results of hypothesis testing indicate that Human Resources, Information Technology, Government Internal Control Systems, and Government Accounting Standards have a significant positive effect on the quality of Local Government Financial Report Information.

Keywords: Quality of Financial Reports, Human Resources, Information Technology, Government Internal Control Systems, Government Accounting Standards

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan sistem keuangan yang modern ini telah meningkat serta mengembangkan proses akuntansi atau tata kelola keuangan. Pemerintah saat ini dituntut untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerja keuangannya serta peningkatan dalam akuntabilitas dan transparansi agar mampu mengikuti perkembangan akuntansi guna memaksimalkan kualitas informasi bagi masyarakat umum. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mempublikasikan informasi melalui laporan keuangan guna dasar pengambilan keputusan yang nantinya informasi tersebut akan digunakan oleh pihak pemakai informasi. Dalam hal ini informasi yang dapat dikatakan bermanfaat jika mampu dipahami, dapat dipercaya, dan dapat digunakan oleh pemakai informasi (Andriani, 2010) dalam (Mahaputra & Putra, 2014).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mengatur jenis pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk situasi ini, upaya untuk mengakui keterusterangan dan tanggung jawab dalam administrasi baik di pemerintah pusat maupun di sekitarnya adalah dengan menyajikan laporan pertanggungjawaban sebagai laporan keuangan (Yuliani dan Agustini, 2016).

Sebagai bentuk tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Upaya untuk mengakui kejujuran dan tanggung jawab dalam pemerintahan, pengurus, baik pemerintah pusat maupun pemerintah negara bagian terdekat, harus menyampaikan

laporan pertanggungjawaban sebagai laporan keuangan (Yuliani dan Agustini, 2016).

Laporan keuangan adalah hal-hal yang disampaikan dalam bidang pembukuan, oleh karena itu untuk membuat laporan keuangan yang baik diperlukan aset yang mumpuni seperti sumber daya manusianya. Di lembaga legislatif terdekat untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas, diperlukan SDM yang lengkap dan pemahaman pengungkapan moneter (Kombong, 2017).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 telah menjelaskan terkait laporan keuangan yang dihasilkan harus meliputi laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) yang berupa laporan realisasi anggaran (LRA) dan laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Laporan keuangan harus berisikan informasi yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai informasi. Laporan keuangan harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dimana informasi yang disajikan akan digunakan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan (Adi, Suardikha, & Putri, 2017).

Tujuan dari laporan keuangan adalah sebagai dasar atas pelaporan informasi keuangan di pemerintahan yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dari pengambilan keputusan. Pemerintah perlu untuk memperhatikan kualitas dari laporan keuangan tersebut agar laporan keuangan dapat memenuhi atau melebihi harapan dari yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini PP. No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia telah mengatur kriteria untuk menilai kualitas dari laporan keuangan tersebut. Kriteria yang sudah ditetapkan tersebut adalah relevan yang artinya informasi memiliki kesesuaian dengan tindakan yang dilakukan oleh pemakai laporan keuangan, andal yang artinya informasi yang disajikan secara wajar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi, dapat dipahami yang artinya informasi mudah untuk dipahami oleh pihak

pengguna informasi dan disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan oleh kemampuan pengguna informasi laporan keuangan pemerintah, serta dapat dibandingkan yaitu informasi dapat dijadikan acuan atau patokan penyusunan antar periode maupun antar entitas.

Setiap tahunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah mendapatkan penilaian dari Badan Pengawas Keuangan berupa Opini. Opini yang diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang dimana opini tersebut dapat diartikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal dan berkualitas; Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dimana dapat diartikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah disajikan secara wajar namun ada hal yang dikecualikan; Opini Tidak Wajar (TP) dimana dapat diartikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tidak disajikan secara wajar; dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP) dimana Badan Pengawas Keuangan tidak menyatakan pendapat atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi DIY telah melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi DIY pada tahun 2015-2020 dengan hasil yang tergolong sangat baik. Seluruh Kabupaten/Kota yang terdiri dari Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2015-2020 (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2020). Dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan (BPK) terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di DIY pada tahun 2015-

2020 dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan kualitas dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada setiap tahunnya dan Pemerintah Daerah dengan sungguh-sungguh dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dipemerintahan.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan instansi pemerintah harus berlandaskan pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dimana Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan syarat mutlak yang harus pemerintah jadikan sebagai pedoman guna kualitas laporan keuangan di Indonesia dapat ditingkatkan. Pegawai pemerintahan dituntut juga untuk memiliki pemahaman akan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang baik guna terciptanya kualitas informasi laporan keuangan pemerintah yang baik.

Kualitas dari laporan keuangan pemerintah daerah juga tidak terlepas dari pengaruh kualitas sumber daya manusia (SDM). Dimana banyak pegawai pemerintahan yang tidak berlatar belakang pendidikan dibidang akuntansi yang pada akhirnya menjadikan kurang adanya pemahaman dan penguasaan dari aparatur Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menyebabkan kurangnya efektivitas serta efisiensi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah (Karmila, Tanjung dan Darlis, 2014). Dalam hal ini kompetensi atau kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor yang sangat penting guna menghasilkan informasi laporan keuangan yang baik (Wati, Herawati dan Sinarwati, 2014).

Penggunaan teknologi informasi pada saat ini adalah suatu keharusan, khususnya dalam proses transaksi elektronik. Dimana hal ini sangat penting bagi pemerintah guna meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan pelayanan publik. Selain dari segi kualitas penggunaan teknologi informasi juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta keakuratan dalam pelaksanaan pelayanan publik. Penyimpanan data yang jauh lebih besar dan dapat menghemat biaya dalam proses pelaksanaan pelayanan publik juga

menjadi nilai tambah penggunaan teknologi informasi. Terlepas dari banyaknya kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi informasi, juga terdapat kendala yang memungkinkan dalam penerapannya menjadi belum maksimal. Dimana dalam penggunaan teknologi informasi juga membutuhkan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang memadai dan perawatan yang rutin, kemudian dari segi pemahaman sumber daya manusia dalam penggunaan maupun perawatan dari teknologi informasi yang belum merata, serta dari segi dana yang dikeluarkan untuk dapat menggunakan teknologi informasi yang saling terintegrasi juga membutuhkan dana yang tidak sedikit (Kombong, 2017).

Dalam meningkatkan pemanfaatan inovasi data, diperlukan dukungan dari kerangka pengendalian internal yang baik. Hal ini diperjelas dalam Permendagri Nomor 4 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa sifat laporan keuangan pemerintah lingkungan diperkirakan dengan kesamaan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Sistem Pengendalian Intern (SPI). Hal ini membuktikan pemerintah daerah untuk memilah dan melaksanakan kerangka pengendalian internal yang layak untuk memperluas kualitas data ringkasan fiskal pemerintah lingkungan yang tak tergoyahkan (Trisnani, et al, 2017).

Dari sekian banyak laporan keuangan yang diedarkan oleh otoritas Publik, sebagaimana dilansir AntaraNews.com pada 10 November 2020, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap lebih dari 485 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2019 hasil dari penilaian pada Semester 1 - 2020 telah memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Secara rinci, hasil dari penilaian BPK terhadap LKDP semester 1-2020 mengungkap 6.160 penemuan berisi 10.499 persoalan. Isu tersebut terdiri dari 5.175 isu yang terkait dengan sistem intern dan 5.324 permasalahan ketidakpatuhan dengan pengaturan undang-undang. Dari pemasalahan ini negara mengalami kerugian sebesar Rp1,52 triliun. Oleh karena itu, kualitas laporan

keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting guna menunjukkan bagaimana tanggungjawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan organisasi.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Andhivanna & Hikmahwati (2020) dengan persamaan variabel kualitas SDM, pemanfaatan TI, pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dan pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dari objek penelitiannya, yang semula hanya satu OPD menjadi lima OPD. Dimana objek penelitian ini adalah OPD yang ada di DIY, karena selama kurun waktu lima tahun berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sehingga laporan keuangan tersebut dapat dikatakan berkualitas. Meskipun kelima kabupaten mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut bukan berarti daerah-daerah tersebut bebas dari tindak penyimpangan. Pengkajian dilakukan terbatas pada beberapa penyebab rendahnya kualitas laporan pemerintah daerah antara lain kualitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi (TI), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Studi penelitian yang dilakukan untuk tugas akhir ini dilakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang ada di kabupaten/kota Provinsi DIY. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Yogyakarta, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulonprogo, dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunung Kidul merupakan tempat dilaksanakannya penelitian. Dengan pertimbangan bahwa fungsi dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) adalah melaksanakan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, dimana hal ini Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten membantu Bupati dalam penyusunan laporan keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan menggunakan empat faktor yaitu Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Teknologi Informasi (TI), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diduga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi dari kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat diketahui rumusan masalah yang ada di dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ?
2. Apakah Teknologi Informasi (TI) berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ?
3. Apakah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ?
4. Apakah Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Teknologi Informasi (TI) terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

(SPIP) terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4. Untuk mengetahui Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat antara lain :

Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang berhubungan dengan pengaruh Sumber Daya Manusia (SDM), Teknologi Informasi (TI), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sehingga peneliti dapat mengimplementasikan ilmu dan teori yang telah dipelajari.

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan terkait dengan literatur akuntansi yang sudah ada dan menjadikan penelitian ini untuk memperkuat penelitian-penelitian terkait dengan faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah yang sudah ada.

Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi yang berguna untuk baik pemerintah maupun pengguna informasi laporan keuangan terkait dengan adanya fakto-faktor yang mempengaruhi

kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang tersusun secara sistematis sebagai berikut:

1. BAB I : Pendahuluan, menjelaskan terkait dengan latar belakang yang menjadi dasar dalam topik permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian dan juga sistematika dalam penulisan dari penelitian ini.
2. BAB II : Tinjauan Pustaka, menjelaskan terkait dengan teori-teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian dan kerangka pemikiran.
3. BAB III : Metode Penelitian, menjelaskan terkait dengan populasi dan sampel, variable variabel penelitian, metode pengumpulan data dan Teknik analisis data yang digunakan.
4. BAB IV : Analisis Data dan Pembahasan, menjelaskan terkait dengan hasil dari pengujian data yang sudah diolah dan pembahasan terkait dengan hasil pengujian data yang diperoleh.
5. BAB V : Penutup, menjelaskan terkait dengan kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengujian data, implikasi penelitian, dan keterbatasan dalam melaksanakan penelitian serta saran dari penulis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Bergman dan Lane (1990) menjelaskan teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Disebutkan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan *principal agent*. Kerangka hubungan *principal agent* merupakan suatu pendekatan yang penting dalam menganalisis komitmen-komitmen dalam kebijakan publik. Berkenaan dengan asosiasi area publik, Mardiasmo (2002) menjelaskan bahwa gagasan tanggung jawab adalah komitmen administrator hukum (spesialis) untuk memberikan tanggung jawab, menyajikan, melaporkan, dan mengungkap semua jenis latihan dan latihan yang menjadi kewajibannya kepada masyarakat. kumpul-kumpul memberi perintah (kepala). Dalam hal ini, tanggung jawab di bidang publik mengandung arti bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat hubungan organisasi antara daerah sebagai kepala daerah dan pemerintah lingkungan sebagai ahlinya.

Teori Keagenan juga menggambarkan bahwa hubungan yang terjadi antara rakyat dengan pemerintah dapat dianggap sebagai hubungan yang muncul karena kesepakatan yang dibuat oleh rakyat (*principal*) yang menggunakan pemerintah (*agent*) untuk menyelaraskan tujuan rakyat dan pemerintah. Rakyat mewajibkan pemerintah bertanggung jawab melalui mekanisme pelaporan dan rakyat melalui legislatif, dapat mengukur, menilai sekaligus mengawasi kinerja pemerintahan sejauh mana pemerintah telah bertindak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meminimalkan

kecurangan. Dalam praktiknya pelaporan keuangan dalam sektor publik didasari oleh teori keagenan. Dimana pelaporan keuangan tersebut pemerintah selaku *agent* memiliki kewajiban untuk menyajikan informasi yang bermanfaat dan berguna bagi pengguna informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah yang bertindak selaku *agent* yang memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan yang bermanfaat dan berguna sebagai informasi bagi para pengguna atau publik dalam hal ini bertindak sebagai pihak *principal*. Sumber daya manusia (SDM), teknologi informasi (TI), sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan Standar akuntansi pemerintah (SAP) yang merupakan unsur-unsur yang terdapat dalam pemerintah selaku *agent* guna mewujudkan kualitas laporan keuangan daerah sebagai informasi yang akan diterima oleh publik sebagai pihak *principal*.

2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas merupakan proses terjadinya pemenuhan kebutuhan serta harapan konsumen. Laporan keuangan adalah catatan yang berisi tentang informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja dari suatu entitas. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur terkait dengan posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan entitas pelaporan (Kombong, 2017).

Tujuan secara umum dari laporan keuangan adalah menyajikan informasi terkait dengan posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan dari suatu entitas pelaporan yang berguna bagi pengguna informasi dalam menentukan keputusan serta bahan evaluasi terkait dengan

alokasi sumber daya. Secara lebih spesifik, tujuan dari pelaporan keuangan pemerintah merupakan penyajian informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan serta mempunyai peran prediktif dan prospektif. Informasi dalam laporan keuangan juga relevan untuk memenuhi tujuan laporan keuangan pemerintah, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut.

Kualitas laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses kegiatan akuntansi yang dapat memberikan informasi terkait dengan keuangan yang dapat dipahami serta dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Kualitas laporan keuangan dapat ditentukan dari kriteria dan unsur-unsur kualitas yang tertera pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Terdapat empat macam karakteristik kualitas informasi keuangan yang merupakan prasyarat normatif yang dibutuhkan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang diinginkan:

a. Relevan

Dapat dikatakan relevan jika informasi tersebut memiliki manfaat serta dapat memberikan pengaruh untuk pengambilan keputusan. Dimana informasi yang dikatakan relevan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dari peristiwa masa lalu, masa sekarang dan masa depan (*predictive value*), dapat memperbaiki harapan yang telah dibuat sebelumnya (*feedback value*) dan informasi harus tersedia tepat waktu untuk pengguna informasi dapat menggunakannya sebagai salah satu dasar pengambilan

keputusan (*timeliness*).

b. Andal atau *Reliable*

Keandalan informasi merupakan Informasi dalam laporan keuangan yang bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, disajikan dengan jujur (netral) dan dapat diverifikasi (*verifiable*).

c. Dapat Dibandingkan

Informasi laporan keuangan akan dapat digunakan jika informasi dapat dibandingkan dengan informasi laporan keuangan sebelumnya atau dengan laporan keuangan lainnya.

d. Dapat Dipahami

Data yang terkandung dalam laporan keuangan dapat dirasakan, akan membantu klien dan dikomunikasikan dalam kata-kata yang disesuaikan sejauh mungkin. Untuk situasi ini, klien diterima untuk memiliki informasi yang cukup tentang latihan dan iklim kerja elemen pengungkapan, seperti halnya keinginan klien untuk memperoleh kemahiran dengan data.

2.1.3 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sebagaimana ditunjukkan oleh Winidyaningrum (2009), yang dimaksud dengan kemampuan seseorang adalah kapasitas individu atau individu untuk menyelesaikan kapasitas atau kewajibannya untuk mencapai tujuan secara memadai dan produktif. Dimana batasan SDM harus terlihat dari kemampuan menciptakan hasil dan hasil.

Menurut Mangkunegara (2000: 67) menyatakan bahwa pelaksanaan pekerja (*work execution*) adalah pekerjaan menghasilkan kualitas dan jumlah yang dicapai dengan seorang pekerja dalam menyelesaikan kewajibannya sebagaimana mestinya

kewajiban yang diberikan kepadanya dan kemudian disempurnakan oleh Mangkunegara (2014: 9) beralasan bahwa penyajian SDM atau pelaksanaan pekerjaan merupakan efek samping dari pekerjaan atau pekerjaan (hasil) baik kualitas maupun jumlah yang dicapai SDM per rentang waktu dalam melaksanakan mengerjakan tugas sesuai dengan kewajiban yang diberikan.

Kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang untuk mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Kompetensi merupakan karakteristik dari seseorang yang memiliki ketrampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan pekerjaan (Harvesi 2005). Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah harus memiliki sumber daya manusia yang berkompeten.

Kompetensi merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh PNS, yaitu :

a) Pengetahuan atau *knowledge*

Pengetahuan (*knowledge*) adalah informasi yang diketahui oleh seorang pekerja untuk melakukan kewajiban dan kewajibannya sesuai bidangnya. Perwakilan juga memutuskan keberhasilan atau kekecewaan dari pelaksanaan tugas yang dilimpahkan kepada mereka, pekerja yang memiliki tingkat informasi yang memadai dapat lebih mengembangkan produktivitas organisasi.

b) Keterampilan atau *skill*

Keterampilan (*skill*) atau bisa disebut juga kemampuan adalah suatu pekerjaan untuk melakukan kewajiban dan kewajiban yang diberikan oleh organisasi kepada seorang pekerja secara tepat dan maksimal, misalnya kemampuan dalam memahami dan membujuk orang lain, baik secara eksklusif maupun dalam perkumpulan..

c) Sikap (*attitude*)

Sikap atau *attitude* merupakan perilaku atau pola tingkah seseorang dalam menyelesaikan tugas serta tanggungjawab sesuai dengan yang sudah diatur dalam peraturan.

Sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dibidangnya merupakan hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien (Permendagri No 2 Tahun 2013).

2.1.4 Teknologi Informasi (TI)

Komputer, *software*, basis data, dan jenis lainnya termasuk dalam TI. TI merupakan teknologi yang dimanfaatkan untuk pengelolaan data, mendapatkan, pemrosesan, penyusunan, penyimpanan dan pemanipulasian dengan berbagai cara untuk menyediakan informasi yang berkualitas dan strategis untuk pengambilan keputusan (Setyowati, L., Isthika, W., & Pratiwi, R. D., 2016).

2.1.5 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal dalam pemerintah daerah adalah siklus dasar dalam kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah dan semua perwakilan untuk memberikan kepercayaan dalam pencapaian tujuan otoritatif melalui latihan yang sukses, mahir dan solid.

Unsur-unsur dalam sistem pengendalian internal pemerintah menurut peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengacu pada unsur SPI yang telah dipraktikkan pada lingkungan pemerintahan di berbagai negara yang meliputi:

1. Lengkungan Pengendalian

Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 menjelaskan bahwa

lingkungan pengendalian adalah gambaran dari sikap suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran dan tindakan dari anggota organisasi terkait dengan pengendalian lingkungan.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah sebuah mekanisme yang dilakukan untuk mengelola berbagai risiko yang ada didalam organisasi guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 menjelaskan terkait dengan penilaian risiko seperti berikut:

- a. Identifikasi risiko, dilaksanakan dengan menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan bertujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif, menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal serta menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.
- b. Analisis risiko, dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang sesuai dengan kebijakan dan prosedur guna mengatasi risiko serta memastikan bahwa kegiatan berjalan dengan efektif dan efisien.

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi disajikan kepada pemerintah dan pihak yang berkepentingan dalam bentuk serta waktu yang sudah ditetapkan guna pelaksanaan

pengendalian serta tanggungjawab.

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Tindakan yang dilakukan untuk menilai kualitas dari struktur pengendalian intern dan memastikan bahwa pengendalian berjalan dengan semestinya.

2.1.6 Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Menurut Bastian, I (2010) menjelaskan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Mengingat Permendagri No. 59 Tahun 2007, standar akuntansi pemerintah daerah merupakan perkembangan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 mengatur terkait dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Dijelaskan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip yang diterapkan sebagai dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintah (SAP) diterapkan pada lingkup pemerintahan pusat dan pemerintah daerah serta organisasi yang berada di lingkungan pemerintahan pusat dan daerah.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) telah dimuat pada standar

akuntansi pemerintah menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 sebagai berikut:

1. PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan

Bertujuan untuk mengatur terkait dengan penyajian dari laporan keuangan untuk tujuan umum guna peningkatan keterbandingan laporan keuangan.

2. PSAP Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Bertujuan untuk menyediakan informasi terkait dengan sumber pendapatan, alokasi dan penggunaan dari sumber daya ekonomi. Informasi yang disediakan oleh laporan realisasi anggaran ini berguna untuk evaluasi keputusan terkait pengalokasian sumber daya ekonomi. Dimana laporan realisasi anggaran ini memberikan gambaran perbandingan terkait dengan anggaran dengan bagaimana realisasi yang telah dilaksanakan pada satu periode pelaporan.

3. PSAP Nomor 3 tentang Laporan Arus Kas

Penjelasan Pendapatan langsung berhubungan dengan pengenalan pendapatan yang memberikan data kronik tentang perubahan uang riil dan rekanan uang dari zat pengumuman dengan mengelompokkan pendapatan tergantung pada latihan kerja, kontribusi sumber daya, non-moneter, pembiayaan dan non-moneter selama periode pembukuan. dan keseimbangan antara uang dan uang timbal balik dalam kerangka waktu pembukuan. mengungkapkan tanggal.

4. PSAP Nomor 4 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan yang dibutuhkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dalam hal ini agar laporan

keuangan yang disajikan dapat dipahami oleh orang pada umumnya. Catatan atas Laporan Keuangan dibuat berisikan informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan karena laporan keuangan memiliki potensi mengandung kesalahpahaman informasi di antara pembacanya.

5. PSAP Nomor 5 tentang Akuntansi Persediaan

Bertujuan untuk menilai barang atau perlengkapan persediaan yang diatur guna memberikan informasi yang diperlukan untuk disajikan dalam laporan keuangan.

6. PSAP Nomor 6 tentang Akuntansi Investasi

Berarti untuk mengontrol perlakuan mewakili usaha dan memberikan data penting untuk diperkenalkan dalam laporan anggaran. Untuk situasi ini, spekulasi yang dibuat dipisahkan menjadi usaha jangka panjang yang merupakan sumber daya tidak lancar dan usaha sesaat yang merupakan sumber daya lancar.

7. PSAP Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap

Bertujuan untuk mengatur akuntansi untuk aset tetap, dimana aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan untuk dipergunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dipergunakan untuk masyarakat umum. PSAP No 7 tentang Akuntansi Aset Tetap berisikan klasifikasi, pengakuan, pengukuran aset tetap, penyajian dan pengungkapan.

8. PSAP Nomor 8 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

Sarana untuk mengelola perawatan pembukuan untuk pembangunan yang sedang berlangsung dengan menggunakan teknik penghargaan kronik. Kepastian berapa biaya yang ditimbulkan belum ditentukan lembar dan jaminan

alasan pengakuan dan pengungkapan biaya pembangunan.

9. PSAP No 09 Akuntansi Kewajiban

Penjelasan prinsip-prinsip pembukuan pertanggungjawaban rencana untuk mengendalikan perlakuan pembukuan yang mencakup jam pengakuan, jaminan jumlah pengiriman, amortisasi dan biaya perolehan yang dibebankan pada kewajiban. Komitmen akan muncul sebagai hasil dari melakukan kewajiban dan kewajiban dan kegiatan masa lalu.

10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa

Bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan akuntansi dan peristiwa luar biasa. Kebijakan akuntansi merupakan dasar-dasar yang spesifik dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Peristiwa luar biasa yang dimaksud adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal entitas.

11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian

Berharap dapat mengelola kesiapan ringkasan anggaran gabungan di unit pemerintah untuk memperkenalkan laporan moneter untuk tujuan umum untuk bekerja pada sifat laporan moneter ini..

12. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional

Bertujuan untuk menyediakan informasi terkait dengan kegiatan operasional keuangan secara menyeluruh yang nantinya akan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah telah beberapa kali dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan di Indonesia antara lain Haza (2014); Mahaputra dan Putra (2014); Sinarwati,dkk (2014), Wardani (2017); Rahmah & Zulkifli (2018); Welly & Seputra (2019) dan lainnya.

Irfan Ikhwanul Haza (2014) meneliti terkait dengan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa teknologi informasi dapat dimanfaatkan dengan syarat jumlah kuantitas dan kualitasnya baik, serta ketersediaan sarana penunjang yang dibutuhkan (seperti, jaringan dan *software*).

Mahaputra dan Putra (2014) telah memimpin penelitian yang berkaitan dengan dampak batas aset manusia, penggunaan inovasi data, kerangka pengendalian internal, dan pedoman pembukuan pemerintah tentang sifat data pengumuman moneter provinsi. Kemudian, pada saat itu, diamati bahwa keterbatasan SDM, kerangka pengendalian internal, penggunaan inovasi data dan prinsip pembukuan pemerintah secara signifikan mempengaruhi data pengumuman moneter pemerintah di sekitarnya.

Desianawati, Herawati, dan Sinarwati (2014) telah memimpin penelitian terkait dampak kemampuan aset manusia, pemanfaatan SAP, kerangka pembukuan keuangan daerah terhadap sifat laporan keuangan pemerintah daerah. Kemudian, pada saat itu, muncul ulasan bahwa setiap elemen yang dipertimbangkan memengaruhi sifat laporan keuangan pemerintah setempat.

Wardani (2017) melihat Dampak Nilai SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa Di Klaten. Konsekuensi dari eksplorasinya menyatakan bahwa Sifat SDM dan Sisitem Pengendalian Intenral memiliki hasil konstruktif yang sangat besar

pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, pemanfaatan TI tidak sepenuhnya mempengaruhi kualitas dari LKPD.

Kurnia Rahmah dan Zulkifli (2018) meneliti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Sifat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Gunungkidul. Kemudian, pada saat itu, tinjauan menyatakan bahwa pemanfaatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berdampak positif dan tidak material, Standar Akuntansi Pemerintah berdampak positif dan tidak relevan.

Welly & Riqki Seputra (2019) meneliti Faktor Penentu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berikut adalah penelitian terdahulu terkait dengan fakto-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi keuangan:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Hasil dari Penelitian
(Haza, 2014)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah	Teknologi informasi dapat dimanfaatkan jika jumlah dari kuantitas terpenuhi dan kualitas yang baik, serta terpenuhinya sarana penunjang (seperti, jaringan dan <i>software</i>).
(Mahaputra & Putra, 2014)	Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan	Batas aset manusia, kerangka kerja kontrol dalam, penggunaan inovasi data, SAP secara

	Pemerintah Daerah	signifikan memengaruhi sifat data laporan moneter.
(Wati, Herwati dan Sinarwati, 2014)	Pengaruh kompetensi SDM, Penerapan SAP dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah	Keterampilan aset manusia, pemanfaatan SAP dan Kerangka Pembukuan Moneter Provinsi secara positif memengaruhi sifat laporan moneter pemerintah di sekitarnya.
(Wardani, D. K. & Andriyani, I., 2017)	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa Di Klaten	Kualitas SDM dan Kerangka Kontrol Orang Dalam memiliki hasil bermanfaat yang sangat besar pada kualitas yang tak tergoyahkan dari Pengumuman Moneter Pemerintah Kota. Sementara itu, pemanfaatan Inovasi Data pada dasarnya tidak memengaruhi Kualitas Pembukaan Uang Pemerintah Kota.
(Rahmah & Zulkifli, 2018)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis AkruaL Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul	Penggunaan pedoman pembukuan pemerintah memiliki hasil menguntungkan yang tidak penting, kerangka pembukuan moneter lokal memiliki hasil yang tidak besar manfaatnya.

(Welly & Seputra, 2019)	Faktor Penentu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
-------------------------	--	--



2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber daya manusia adalah sumber daya yang memiliki perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya serta karya. Semua potensi sumber daya manusia ini mempengaruhi upaya organisasi untuk mencapai tujuannya. Sumber daya manusia merupakan faktor penentu bagi organisasi dan kapasitas merupakan aspek yang menentukan keberhasilan organisasi.

Kualitas sumber daya manusia di lingkungan instansi merupakan salah satu penentu diperolehnya kualitas laporan keuangan (LKPD) yang baik sehingga pemerintah menggunakannya dalam proses pengambilan keputusannya. Dapat dikatakan bahwa sifat SDM yang baik juga akan bekerja pada sifat pengungkapan keuangan pemerintah daerah.

Kualitas dari SDM mempengaruhi terpenuhi atau tidaknya kualitas laporan keuangan yang nantinya akan digunakan dalam proses pengambilan keputusan dari pihak pemerintahan. Manusia adalah pilar penyangga utama yang menjadi penggerak roda dalam sebuah organisasi guna mencapai tujuan akhir yaitu tercapainya visi dan misi (Sudiarianti, Ulupui, dan Budiasih, 2015). Sumber daya manusia merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap organisasi sehingga perlu dikelola, diatur dan dimanfaatkan agar berfungsi secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi (Suharto, 2012).

Dengan kompetensi yang tinggi yang dimiliki oleh sumber daya manusia dalam suatu organisasi tentu hal ini akan menentukan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki yang pada akhirnya akan menentukan kualitas kompetitif perusahaan itu sendiri. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan secara efektif dan efisien.

Penelitian mengenai kualitas atau kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam pelaksanaan keuangan daerah yang sudah pernah dilakukan oleh Desianawati, Herawati, dan Sinarwati (2014) mengungkapkan bahwa kualitas dari SDM secara positif mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas diturunkan hipotesis ke 1 sebagai berikut :

H1: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.3.2 Pengaruh Teknologi Informasi (TI) terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sesuai (Haza, 2014) TI dapat diartikan sebagai teknologi yang digunakan untuk mengolah informasi, termasuk menangani, memperoleh, memesan dan menyimpan informasi dengan cara yang berbeda untuk memberikan data berkualitas, yang relevan, akurat dan tepat. Penggunaan TI dapat mengurangi blunder dalam penanganan informasi, sehingga laporan keuangan menjadi andal (Wardani dan Andriyani, 2017). TI dapat

digunakan dengan asumsi jumlah dan kualitas yang besar, serta tersedianya sarana penunjang yang dibutuhkan (Wardani, D. K. dan Marlinawati, 2018).

Berdasarkan Teori agensi (Jensen dan Meckling, 1976) yang menjelaskan hubungan organisasi mengenai kesepakatan di mana setidaknya satu (kepala) memerintahkan orang lain (spesialis) untuk melakukan bantuan untuk kepentingan kepala dan menyetujui spesialis untuk menentukan pilihan terbaik untuk kepala, penting untuk memanfaatkan TI. Untuk situasi ini, pemanfaatan TI akan membuat kemampuan dan kecukupan dalam penyusunan laporan keuangan. Semakin baik pemanfaatan TI, semakin baik sifat laporan keuangan itu sendiri.

Pengawasan keuangan daerah atau bisa disebut pengelolaan moneter teritorial juga dapat mempengaruhi nilai data laporan keuangan pemerintah. Kerangka kerja akan berjalan dengan baik dengan asumsi bahwa ada pengawasan untuk menjamin kerangka kerja berjalan seperti yang diharapkan, untuk membantu pelaporan keuangan yang berkualitas. Mengingat penelitian sebelumnya (Nadir, R., dan Hasyim, H, 2017) menunjukkan bahwa pemanfaatan TI memiliki dampak besar langsung pada kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas diturunkan hipotesis ke 2 sebagai berikut:

H2: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan

2.3.3 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan serta kegiatan yang dilakukan secara terus menerus yang dilakukan oleh pemimpin dan seluruh anggota guna memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan dari organisasi secara efektif dan efisien, andal, serta taat pada peraturan perundang-undangan (Peraturan pemerintah No 60 Tahun 2008). Pengendalian internal pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 30 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sistem pengendalian internal memiliki kapasitas untuk memberikan penegasan yang memuaskan yang memadai untuk membuat efektivitas serta efisiensi dalam proses akuntansi guna terciptanya keandalan pada laporan keuangan. Untuk situasi ini, penerapan SPI dapat meningkatkan angka reliabilitas, objektivitas serta meminimalisir inkonsistensi.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan tata kelola keuangan negara dapat dilakukan melalui penguatan sector pengawasan, pendelegasian wewenang, dokumentasi atas transaksi, pencatatan yang akurat dan tepat serta pengujian SPI yang sudah ada. Dengan demikian, sistem pengendalian internal diperlukan untuk berjalan sesuai dengan komponen untuk membuat laporan keuangan yang berkualitas baik.

Wardani (2017) membuktikan bahwa pengendalian intern pemerintah daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas dari laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas dapat

diturunkan hipotesis ke 3 sebagai berikut :

H3 : Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.3.4 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 telah mengatur terkait dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Standar akuntansi pemerintah merupakan dasar-dasar yang harus diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Dimana standar akuntansi pemerintah sendiri memiliki lingkup pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, serta organisasi di lingkungan pemerintah baik pusat maupun daerah. Dengan demikian penerapan standar akuntansi dipercaya akan memberikan dampak pada meningkatnya kualitas laporan keuangan di pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.

Sesuai (Mahmudi, 2011) pedoman pembukuan pemerintah (SAP) adalah standar yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Prinsip-prinsip pembukuan pemerintah menjadi acuan atau dasar pemikiran dalam penyusunan laporan keuangan. Apabila standar akuntansi pemerintahan telah dipahami maka akan dapat menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dengan benar. Kualitas laporan keuangan yang baik akan berdampak pada tata Kelola

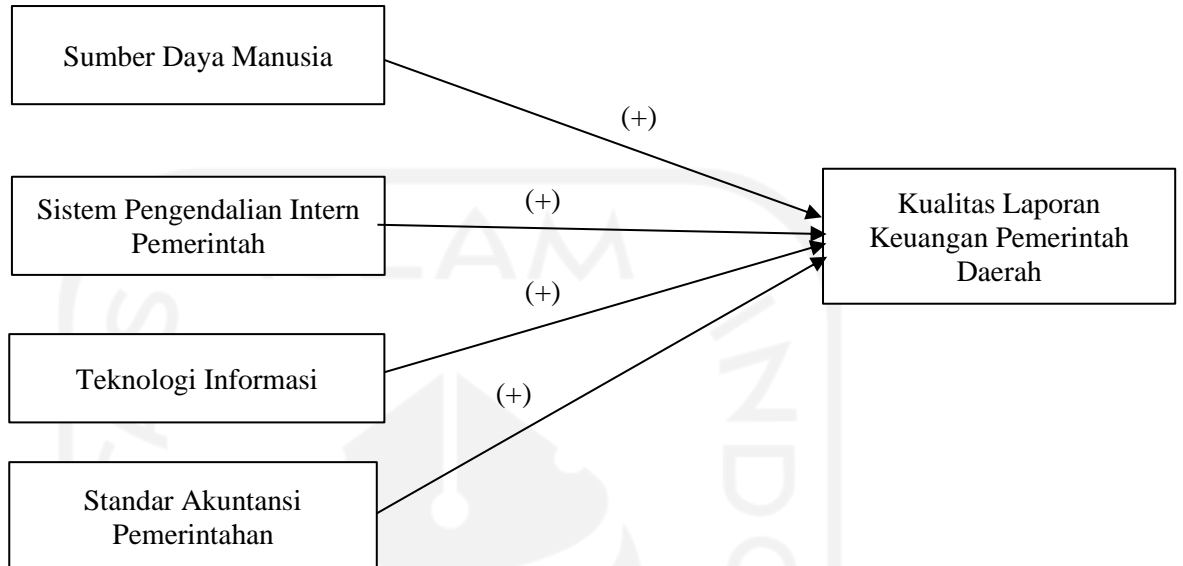
pemerintahan Penelitian yang dipimpin oleh Mahaputra dan Putra (2014) menunjukkan bahwa SAP secara signifikan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas diturunkan hipotesis ke 4 sebagai berikut:

H4 : Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah



2.4. Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi Dan Sampel

Populasi penelitian adalah perwakilan dari Badan Anggaran dan Sumber Daya Kota (BKAD) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu penentuan sampel atas dasar pertimbangan. Sampel pada penelitian ini adalah pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang memahami dan mengetahui tentang laporan keuangan atau bekerja pada bidang keuangan.

Penelitian ini ditujukan kepada Badan Anggaran dan Perbendaharaan Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari BKAD Kota Yogyakarta, BKAD Kabupaten Gunung Kidul, BKAD Kabupaten Kulonprogo, BKAD Kabupaten Sleman, dan BKAD Kabupaten Bantul. Penelitian ini didasarkan atas pertimbangan tugas pokok dari BKAD itu sendiri sebagai pihak yang menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Di dalam fungsinya BKAD melaksanakan penyusunan laporan keuangan daerah, dalam hal ini membantu bupati dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Salah satu proses penyusunan laporan keuangan daerah adalah melakukan konsolidasi laporan keuangan semua SKPD yang ada di lingkungan kabupaten/kota dan menghasilkan output berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Sampel responden dari penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan ditetapkannya beberapa kriteria. Penentuan kriteria dilakukan

karena pihak tersebut mampu untuk menggambarkan kualitas laporan keuangan yang disusun oleh masing-masing BKAD. Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada OPD BKAD Kota Yogyakarta, BKAD Kabupaten Gunung Kidul, BKAD Kabupaten Kulonprogo, BKAD Kabupaten Sleman dan BKAD Kabupaten Bantul
2. Masa menjabat pekerjaan adalah minimal 2 tahun, karena dianggap mempunyai pemahaman terhadap standar akuntansi berbasis akrual dengan baik.

Penentuan kriteria responden didasarkan pada alasan bahwa kepala bagian dan staf bagian BKAD merupakan pihak yang terlibat langsung dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

3.2 VARIABEL PENELITIAN

3.2.1 Definisi Variabel Penelitian

Pengertian variabel penelitian menurut Sugiyono (2017) adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari sehingga diperoleh informasi tentang hasil tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Faktor-faktor dalam tinjauan ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah variabel terikat yang hasilnya dipengaruhi oleh faktor bebas, sedangkan variabel independen adalah variabel bebas yang

mempengaruhi variabel terikat. Hasil dari penelitian ini merupakan prepektif dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) pada lima kabupaten/kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.2.2 Variabel Dependen

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sesuai dengan peraturan perundang-undnagan No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, disebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah memenuhi prasyarat normatif agar dapat mencapai tujuannya. Indikator kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Variabel kualitas laporan keuangan diukur dengan pertanyaan yang diadaptasi dari penelitian (Sudiarianti 2015). Penelitian ini menggunakan skala likert satu sampai lima. Dimulai dari (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju dan (5) Sangat Setuju.

3.2.3 Variabel Independen

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Menurut Sadili (2010) sumber daya manusia adalah orang-orang yang merancang dan menghasilkan barang atau jasa, mengawasi mutu, memasarkan produk, mengalokasikan sumber daya financial, serta merumuskan seluruh strategi dan tujuan organisasi. Variabel kompetensi SDM menggunakan 3 indikator yaitu pengetahuan, sikap dan keterampilan.

Variabel sumber daya manusia dapat diukur dengan pertanyaan yang diadaptasi dari penelitian (Sudiaranti, N.M, 2015). Penelitian yang dilakukan ini menggunakan skala Likert satu hingga lima. Mulai dari (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju dan (5) Sangat Setuju.

2. Teknologi Informasi (TI)

Teknologi informasi merupakan teknologi yang mempunyai kemampuan untuk menangkap (capture), menyimpan (store), mengolah (process), mengambil kembali (retrieve) dan menyebarkan (transmit) informasi dan sebagai sarana dalam meningkatkan kinerja baik pemerintahan maupun perusahaan yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi tersebut (Wansyah, dkk. 2009). Penelitian ini menggunakan skala likert satu sampai lima. Dimulai dari (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju dan (5) Sangat Setuju.

3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Intern (SPI) memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan bahwa akan terwujudnya efisiensi dan efektivitas pada proses akuntansi guna menghasilkan informasi laproan keuangan yang dapat diandalkan. Menurut Saputra (2015) hubungan antara sistem pengendalian inten dengan kualitas laporan keuangan adalah untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah harus melalui proses dan tahap-tahap yang diatur dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Indikator dalam variabel ini meliputi lingkunfan pengendalian, penilaian

resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Penelitian ini menggunakan skala likert satu sampai lima. Dimulai dari (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju dan (5) Sangat Setuju.

4. Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah aturan dalam menyiapkan dan menyajikan laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan adalah syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman instansi pemerintah agar kualitas laporan keuangan di Indonesia dapat ditingkatkan (PP No. 71 Tahun 2010). Indikator yang ada dalam penelitian ini adalah 11 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu : PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan, PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran, PSAP 03 Laporan Arus Kas, PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan, PSAP 05 Akuntansi Persediaan, PSAP 06 Akuntansi Investasi, PSAP 07 Aset Tetap, PSAP 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan, PSAP 09 Akuntansi Kewajiban, PSAP 10 Koreksi Kesalahan, PSAP 11 Laporan Konsolidasi. Variabel standar akuntansi pemerintahan diukur pertanyaan yang diadaptasi dari penelitian (Sudiarianti 200). Penelitian ini menggunakan skala likert satu sampai lima. Dimulai dari (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju dan (5) Sangat Setuju.

3.3 Metode Penelitian

Teknik pengumpulan informasi atau pengumpulan data yang

dilakukan pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode manual yaitu dengan kuisoner agar nantinya data yang diperoleh akan relevan, andal, objektif serta dapat dijadikan sebagai bahan dalam proses analisis. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan kuesioner ini digunakan untuk memperoleh informasi terkait dengan kompetensi sumber daya manusia (SDM), teknologi informasi (TI), sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), dan standar akuntansi pemerintah (SAP). Data yang diperoleh nantinya akan digunakan untuk menganalisis pengaruhnya terhadap kualitas laproan keuangan pemerintah daerah di kabupaten/kota yang ada di Provinsi DIY. Populasi yang diteliti pada penelitian ini adalah pegawai dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Yogyakarta, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulonprogo, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul. Dimana sampel pada penelitian ini adalah pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang memahami dan mengetahui tentang laporan keuangan atau bekerja pada bidang keuangan. Penyebaran kuisoner dilakukan secara langsung dalam kurun waktu 3 minggu.

3.4 Teknik Analisis Data

3.4.1 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah ukuran yang dimana menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam proses penelitian mempunyai keandalan sebagai alat ukur, diantaranya diukur menggunakan konsistensi hasil pengukuran dari waktu ke waktu jika fenomena yang diukur tidak terjadi perubahan (Harison, dalam Zulganef, 2006).

Untuk menguji tingkat reabilitas kuesioner digunakanlah teknik *Cronbach Alpha*. Menurut Ghozali (2011) mengatakan pada umumnya konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika nilai cronbach Alpha lebih besar dari 0,60.

3.4.2 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sekuat ketepatan instrument atau alat ukur dimana untuk mengukur tingkat ke validitasan suatu koesioner. Uji validitas ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor masing-masing item pertanyaan dalam kuesioner terhadap total skor. Jika korelasi antara masing-masing item pertanyaan dengan total skor tersebut signifikan maka data tersebut dapat dinyatakan valid. Menurut Nazzarudin dan Basuki (2015) uji validitas memiliki kriteria pengujian yaitu apabila nilai dari person correlation seluruh item yang membentuk variabel mempunyai korelasi dengan skor dari masingmasing variabel dapat dikatakan valid apabila di atas 0,25.

3.5 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif yang jelas digunakan untuk memberikan gambaran dan deskripsi tentang faktor-faktor dalam penelitian. Alat yang digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan adalah rata-rata (mean), median dan standar deviasi.

3.6 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan pengujian asumsi statistik yang harus dilakukan pada analisis regresi linear berganda untuk mengetahui apakah model regresi tersebut memenuhi uji asumsi klasik atau tidak. Karena jika model regresi tidak memenuhi uji asumsi klasik maka analisis data tidak dapat dilakukan. Model regresi akan menghasilkan nilai model parameter yang sah apabila dipenuhi asumsi klasik (Putra, 2017). Dalam hal ini uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

3.6.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah telah terdistribusi normal atau tidak di dalam model regresi residual. Uji normalitas menggunakan uji *kolmogorov-smirnov* yaitu apabila data memiliki nilai sig yang lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan data tersebut normal (Nazzarudin dan Basuki, 2015).

3.6.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas diterapkan guna menganalisis regresi berganda yang terdiri dari setidaknya dua atau lebih variable bebas atau

independen ($X_1, 2, 3, \dots, n$) dimana akan diukur kedekatan hubungan antar variable bebas melalui besaran koefisien korelasi (r).

Uji multikolinearitas digunakan dengan tujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variable independe pada model regresi. Dengan asumsi ada keterkaitan, jika terjadi korelasi maka dianggap terdapat masalah multikolinearitas (Sunyoto, 2013).

3.6.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah di dalam model sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Glejser. Kriteria yang ditetapkan adalah jika nilai signifikansi uji $t > 0,05$, maka artinya variabel residual sama (heteroskedastisitas) atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Umar, 2011).

3.7 Analisis Linear Berganda

Analisis linear berganda atau multiple regression bertujuan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variable independent terhadap satu variable dependen (Ghozali, 2013). Model regresi berganda dinyatakan sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Kualitas Laporan Keuangan

a = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi Sumber Daya Manusia

β_2 = Koefisien regresi Teknologi Informasi

β_3 = Koefisien regresi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

β_4 = Koefisien regresi Standar Akuntansi Pemerintahan

X_1 = Variabel Sumber Daya Manusia

X_2 = Variabel Teknologi Informasi

X_3 = Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

X_4 = Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan

e = Variabel pengganggu

3.7.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinan (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat variasi dari variable bebas dapat menjelaskan secara keseluruhan terkait dengan variasi variable bebas. Uji koefisien determinan memperkirakan seberapa besar dampak variabel bebas terhadap naik turunnya variasi dalam nilai variabel. Nilai R^2 ini akan memiliki jangkauan dari 0 hingga satu. Jika nilai R^2 mendekati satu, maka semakin kuat atau semakin memiliki besar pengaruh variable bebas terhadap variable terikat (Setiawan, 2015).

3.7.2 Uji t

Uji t secara umumnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel bebas (independent) secara independen menjelaskan variabel dependen

(terikat) (Ghozali 2013). Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau tingkat signifikansi dengan kriteria jika probabilitas t hitung lebih dari 0,05 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak dan dengan asumsi kemungkinan t hitung di bawah 0,05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Selanjutnya adalah kajian atau analisis penelitian mengenai Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Informasi atau data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dimana data diperoleh dari jawaban responden melalui media kuesioner. Hasil dari kuesioner yang telah dijawab oleh responden akan menjadi informasi dalam menjawab permasalahan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Penelitian pada bab ini meliputi hasil penelitian untuk mengukur data variabel yaitu sumber daya manusia, teknologi informasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan penerapan SAP (Sistem Akuntansi Pemerintah) sebagai variabel independen serta kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen. Penelitian yang dilakukan bersifat kuantitatif dengan metode pengambilan dan pengumpulan data menggunakan kuesioner secara langsung. Sebanyak 100 kuesioner disebar secara langsung pada BKAD Kota Yogyakarta, BKAD Kabupaten Bantul, BKAD Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Sleman. Dari total 100 kuesioner yang disebar, jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 93 kuesioner. Berdasarkan data tersebut, terdapat 89 kuesioner yang layak untuk digunakan. Berikut merupakan table dari penyebaran kuesioner pada tiga Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 4.1
Penyebaran Kuesioner

Kabupaten/Kota	Sebar	Kembali	Layak Digunakan
Kota Yogyakarta	20	19	19
Kabupaten Sleman	20	15	13
Kabupaten Bantul	20	19	17
Kabupaten Gunung Kidul	20	20	20
Kabupaten Kulonprogo	20	20	20
TOTAL	100	93	89

Sumber : Hasil Penelitian, 2021

4.2 Gambaran Umum Responden

4.2.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari 89 responden diperoleh data terkait dengan jenis kelamin responden. Berikut deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin:

Tabel 4.2
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
Pria	39	43,8%
Wanita	50	56,2%
Total	89	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2021

Dilihat dari Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden dibedakan menjadi dua kategori yaitu pria dan Wanita. Dimana dalam pengumpulan

data yang dilakukan dihasilkan sebanyak 39 responden laki-laki atau 43,8% dan 50 atau 56,2% merupakan responden perempuan. Dari informasi yang diperoleh, cenderung diperjelas bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini adalah wanita dengan tingkat 56,2%.

4.2.2 Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan kuesioner yang diterima dari 89 responden diperoleh data mengenai usia responden. Berikut adalah deskripsi responden berdasarkan usia:

Tabel 4.3
Responden Berdasarkan Usia

Umur	Frekuensi	Persentase (%)
21-25 tahun	3	3%
26-30 tahun	8	9%
31-35 tahun	8	9%
36-40 tahun	16	18%
41-45 tahun	27	30%
46-50 tahun	9	10%
51-55 tahun	14	16%
56-60 tahun	4	4%
Total	89	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2021

Tabel 4.3 telah menjelaskan bahwa dalam penelitian ini responden penelitian dapat dikategorikan menjadi delapan kelompok yaitu 21-25

tahun, 26-30 tahun, 31-35 tahun, 36-40 tahun, 41-45 tahun, 46-50 tahun, 51-55 tahun, 56-60 tahun, 41-45 tahun, 46-50 tahun. 51-55 tahun serta 56-60 tahun.

4.2.3 Responden Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan dari kuesioner yang sudah diterima kembali dapat diketahui terkait dengan Pendidikan terakhir dari 89 responden. Berikut adalah deskripsi responden berdasarkan Pendidikan:

Tabel 4.4
Responden Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
SLTA	5	6%
D3	10	11%
S1	47	53%
S2	27	30%
Total	89	100%

Sumber : Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa responden dibedakan menjadi empat kategori yaitu SLTA, D3, S1 dan S2. Dari pengumpulan data dapat diketahui bahwa data pendidikan terakhir responden yaitu SLTA sebanyak 5 atau 6%, D3 sebanyak 10 atau 11%, S1 sebanyak 47 atau 53% dan S2 sebanyak 27 atau 30%.

4.3 Uji Data Penelitian

4.3.1 Hasil Uji Validitas

Uji validitas ini dilakukan dengan berdasar pada analisis item yaitu dengan mengkorelasikan skor pada setiap item dengan skor variabel yang telah diperoleh dari hasil penjumlahan dari seluruh skor item pertanyaan. Metode korelasi yang digunakan adalah *Pearson Connection*, kemudian ditentukan menggunakan program SPSS Ver.25. Item pertanyaan akan dinyatakan valid apabila memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Berikut adalah hasil dari Uji Validitas yang dilakukan dengan menggunakan metode *Pearson Correlation*:

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas

Variabel	Butir	r hitung	r tabel	Keterangan
Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Item 1	0,736	0,208	Valid
	Item 2	0,638	0,208	Valid
	Item 3	0,669	0,208	Valid
	Item 4	0,769	0,208	Valid
	Item 5	0,698	0,208	Valid
	Item 6	0,719	0,208	Valid
	Item 7	0,616	0,208	Valid
	Item 8	0,595	0,208	Valid
	Item 9	0,745	0,208	Valid
Sumber Daya Manusia	Item 1	0,816	0,208	Valid
	Item 2	0,873	0,208	Valid
	Item 3	0,890	0,208	Valid
	Item 4	0,782	0,208	Valid
	Item 5	0,874	0,208	Valid
	Item 6	0,832	0,208	Valid

Teknologi Informasi	Item 1	0,600	0,208	Valid
	Item 2	0,827	0,208	Valid
	Item 3	0,621	0,208	Valid
	Item 4	0,723	0,208	Valid
	Item 5	0,671	0,208	Valid
	Item 6	0,643	0,208	Valid
	Item 7	0,652	0,208	Valid
	Item 8	0,705	0,208	Valid
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Item 1	0,709	0,208	Valid
	Item 2	0,780	0,208	Valid
	Item 3	0,806	0,208	Valid
	Item 4	0,728	0,208	Valid
	Item 5	0,891	0,208	Valid
	Item 6	0,742	0,208	Valid
	Item 7	0,738	0,208	Valid
	Item 8	0,569	0,208	Valid
	Item 9	0,845	0,208	Valid
	Item 10	0,769	0,208	Valid
Standar Akuntansi Pemerintah	Item 1	0,487	0,208	Valid
	Item 2	0,819	0,208	Valid
	Item 3	0,902	0,208	Valid
	Item 4	0,839	0,208	Valid
	Item 5	0,905	0,208	Valid
	Item 6	0,820	0,208	Valid
	Item 7	0,856	0,208	Valid
	Item 8	0,828	0,208	Valid
	Item 9	0,758	0,208	Valid
	Item 10	0,852	0,208	Valid
	Item 11	0,701	0,208	Valid

Sumber : Hasil Penelitian, 2021

Pada Tabel 4.5 dijelaskan bahwa telah diperoleh nilai r_{hitung} dari semua item pada validitas $> r_{tabel}$, maka dari itu semua instrumen penelitian tersebut dinyatakan valid. Maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan teknologi informasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan penerapan

standar akuntansi pemerintah, kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah dinyatakan valid.

4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah pengujian untuk menunjukkan keandalan suatu alat pengukur. Reliabilitas jika responden menjawab pertanyaan yang diajukan dengan konsisten atau stabil. Menurut Ghozali (2018) menyebutkan bahwa suatu instrumen dikatakan reliabel jika *Cronbach's Coefficient Alpha* lebih besar dari 0,6 atau 60%. Berikut adalah hasil uji reliabilitas yang sudah dilakukan:

Tabel 4.6
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0,857	Reliabel
Sumber Daya Manusia	0,913	Reliabel
Teknologi Informasi	0,829	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	0,915	Reliabel
Standar Akuntansi Pemerintah	0,944	Reliabel

Sumber : Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dari semua variabel penelitian yaitu sumber daya manusia, teknologi informasi sistem pengendalian internal pemerintah dan standar akuntansi pemerintah, kualitas

informasi laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan angka di mana lebih besar dari nilai 0,6, Sehingga dapat disimpulkan bahwa jawaban dari responden terkait variabel penelitian dinyatakan reliabel.

4.4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik memiliki tujuan dalam model regresi untuk menentukan apakah layak atau tidaknya suatu data. Model regresi akan disebut baik jika memenuhi syarat tertentu serta akan disebut normalitas, di mana bebas dari suatu gejala mulikolinearitas serta bebas dari heteroskedastisitas. Dalam uji asumsi klasik terdapat tiga jenis uji yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel dependen serta variabel independen memiliki distribusi yang normal atau tidak. Disebut baik jika model regresi memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan cara analisis plot grafik histogram serta uji *kolmogorov-smirnov* (uji K-S). Berikut adalah hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *kolmogorov-smirnov*:

Tabel 4.7
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
n		89
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.56565699
	Most Extreme Absolute	.084

Differences	Positive	.084
	Negative	-.079
Test Statistic		.084
Asymp. Sig. (2-tailed)		.166 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan Tabel 4.7 diketahui jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* adalah sebesar 0,166 atau dapat dikatakan lebih dari nilai 0,05. Dapat diartikan bahwa data penelitian tersebut terdistribusi secara normal, maka uji normalitas ini dinyatakan bahwa asumsi normalitas terpenuhi.

4.4.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Menurut Ghazali (2013) untuk mengetahui apakah ada atau tidak suatu variabel multikolinearitas dilakukan dengan cara melihat *tolerance value* dan dari besarnya *variance inflation factor* (VIF). Di mana jika nilai *tolerance value* > 0,10 atau < 1 dan VIF < 10, dapat diartikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Berikut adalah hasil dari uji multikolinearitas :

Tabel 4.8 Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
SDM	.411	2.432	Tidak terjadi Multikolinearitas
TI	.416	2.405	Tidak terjadi Multikolinearitas

SPIP	.351	2.850	Tidak terjadi Multikolinearitas
SAP	.544	1.837	Tidak terjadi Multikolinearitas

Sumber : Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.8 dapat diketahui bahwa nilai dari VIF adalah < 10 . Dengan nilai VIF dari sumber daya manusia sebesar 2,432; nilai VIF dari teknologi informasi sebesar 2,405; nilai VIF dari sistem pengendalian internal pemerintah sebesar 2,850; dan nilai VIF dari penerapan standar akuntansi pemerintah sebesar 1,837. Kemudian untuk nilai dari *tolerance value* $> 0,10$ atau < 1 dari sumber daya manusia sebesar 0,411; teknologi informasi sebesar 0,416; sistem pengendalian internal pemerintah sebesar 0,351; dan nilai dari penerapan standar akuntansi pemerintah sebesar 0,544. Dapat disimpulkan dari nilai VIF dan *tolerance value* bahwa model regresi pada penelitian tersebut tidak terdapat multikolinearitas, yang berarti telah memenuhi syarat pengujian asumsi klasik yaitu tidak ada atau tidak terjadi multikolinearitas.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui dan menguji apakah model kekambuhan memiliki disparitas perbedaan dimulai dari satu persepsi tersisa kemudian ke persepsi berikutnya. Jika fluktuasi residual yang dimulai dari satu persepsi kemudian ke persepsi berikutnya tetap, disebut homoskedastisitas dan menganggapnya unik, disebut heteroskedastisitas. Disebut hebat dengan asumsi bahwa model relaps tidak terjadi heteroskedastisitas.

Dalam menentukan apakah terjadi heteroskedastisitas atau tidak dapat menggunakan uji Glejser. Dalam uji glejser dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut adalah hasil dari uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser:

Tabel 4.9
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Constant	2.075	1.205		1.722	.089
SDM	.057	.043	.221	1.333	.186
TI	.063	.049	.215	1.303	.196
SPIP	-.065	.044	-.267	-1.486	.141
SAP	-.036	.024	-.220	-1.531	.130

Sumber : Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan hasil dari tabel 4.9 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel sumber daya manusia sebesar 0,186; teknologi informasi sebesar 0,196; sistem pengendalian internal pemerintah sebesar 0,141; dan standar akuntansi pemerintah sebesar 0,130. Dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi semua variabel independen $> 0,05$ artinya bahwa data tidak terjadi Heteroskedastisitas.

4.5 Analisis Regresi Berganda

Setelah semua uji asumsi klasik terpenuhi kemudian dilanjutkan dengan analisis regresi berganda. Di mana analisis berganda bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yang terdiri dari sumber daya manusia (X1), teknologi

informasi (X2), sistem pengendalian internal pemerintah (X3) dan standar akuntansi pemerintah (X4) terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah (Y). Berikut adalah hasil dari perhitungan regresi berganda yang menggunakan *software* SPSS versi 25:

Tabel 4.10
Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Constant	7.459	2.095		3.561	.001
SDM	.194	.074	.216	2.603	.011
TI	.305	.085	.297	3.600	.001
SPIP	.286	.076	.338	3.762	.000
SAP	.093	.041	.163	2.263	.026

Sumber : Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan Tabel 4.10 dapat diketahui bahwa persamaan regresi berganda yang diperoleh dari hasil analisis adalah $Y_{\text{Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah}} = 7.459 + 0,194X_1$ (Kompetensi Sumber Daya Manusia) $+ 0,305X_2$ (Pemanfaatan Teknologi Informasi) $+ 0,286X_3$ (Sistem Pengendalian Internal Pemerintah) $+ 0,093X_5$ (Penerapan SAP).

Dari persamaan regresi terlihat adanya hubungan positif antara SDM (X1) dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y), terdapat hubungan positif antara TI (X2) dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y), ada hubungan positif antara sistem pengendalian internal pemerintah (X3) dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) ada hubungan positif antara standar

akuntansi pemerintah (X4) dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y).

4.5.1 Uji t

Uji t bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Uji t dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai α (alpha) dengan nilai p-value. Di mana jika nilai p-value $< \alpha$ (0,05), maka H_0 ditolak. Dalam penelitian ini pengujian uji t tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidak pengaruh dari sumber daya manusia, teknologi informasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tabel 4.11

Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Constant	7.459	2.095		3.561	.001
SDM	.194	.074	.216	2.603	.011
TI	.305	.085	.297	3.600	.001
SPIP	.286	.076	.338	3.762	.000
SAP	.093	.041	.163	2.263	.026

Sumber : Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa :

1. Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah karena nilai t hitung = 2,603 di mana

lebih besar dari t tabel = 1,989 dan juga nilai signifikansinya sebesar 0,011 atau lebih kecil dari 0,05.

2. Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah karena nilai t hitung = 3,600 di mana lebih besar dari t tabel = 1,989 dan juga nilai signifikansinya sebesar 0,030 atau lebih kecil dari 0,05.
3. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah karena nilai t hitung = 3,762 di mana lebih besar dari t tabel = 1,989 dan juga nilai signifikansinya sebesar 0,049 atau lebih kecil dari 0,05.
4. Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah karena nilai t hitung = 2,263 di mana lebih besar dari t tabel = 1,989 dan juga nilai signifikansinya sebesar 0,026 atau lebih kecil dari 0,05.

4.5.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi atau *adjusted R square* (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peran variabel-variabel bebas atau independen yaitu sumber daya manusia, teknologi informasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan standar akuntansi pemerintah terhadap variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berikut adalah hasil dari koefisien determinasi:

Tabel 4.12
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.873a	.762	.751	1.603

Sumber : Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa nilai *adjusted R square* (R^2) sebesar 0,751 di mana angka tersebut menjelaskan bahwa variabel sumber daya manusia, teknologi informasi, sistem pengendalian internal pemerintah dan standar akuntansi pemerintah memiliki peran besar hingga dapat menjelaskan terkait dengan variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4.6 Pembahasan

1. Pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan, terlihat bahwa b_1 adalah 0,194, yang berarti terdapat hubungan antara SDM dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memiliki hubungan positif. Dimana hasil dari olah data yang dilakukan dengan metode regresi juga menunjukkan nilai $\text{sig.} = 0,011$ dengan Level of Significant = 5%, yang artinya terdapat pengaruh positif antara sumber daya manusia (H_1) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y). Semakin tinggi kualitas atau kompetensi dari sumber daya manusia maka akan semakin berkualitas dari laporan keuangan

pemerintah daerah tersebut. Pada teori *agency* telah dijelaskan bahwa terdapat hubungan keagenan yang merupakan suatu kontrak antara rakyat (*principal*) dengan pemerintah (*agent*) sehingga pemerintah harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka memenuhi wewenang yang diberikan rakyat untuk bertanggungjawab dalam mewujudkan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Keberhasilan organisasi publik dipengaruhi peran sumber daya manusianya, dalam perannya sumber daya manusia ditekankan pada kemampuan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat terkait dengan bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Oleh karena itu, kompetensi sumber daya manusia (SDM) pada setiap manajemen menjadi *urgent* baik pada level pimpinan maupun staf pemerintahan (Suhardjo, 2019). Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten. Kompetensi merupakan karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan pekerjaan (Putri, 2020).

Maksyur (2015) menyatakan bahwa sumber daya manusia (SDM) memengaruhi kualitas laporan keuangan, ini berarti apabila sumber daya manusia dikelola dengan baik maka akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten dan berkualitas sehingga proses pencatatan sampai dengan pembuatan laporan keuangan akan menjadi semakin baik.

Konsekuensi dari tinjauan ini sesuai dengan hasil pemeriksaan yang diarahkan oleh Desianawati, Herawati dan Sinarwati (2014) dan Wauriasih,

A (2019) yang menyatakan bahwa (HR) memiliki dampak positif dan kritis terhadap sifat laporan moneter pemerintah terdekat. .

2. Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sutarman (2013) menjelaskan bahwa manfaat dari penerapan teknologi informasi yaitu kecepatan, konsistensi, ketepatan, dan keandalan. Berdasarkan hasil dari analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa b_2 adalah 0,305 yang artinya hubungan antara teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memiliki hubungan positif. Di mana hasil dari pengolahan data yang dilakukan dengan regresi juga menunjukkan nilai sig. = 0,001 dengan Level of Significant = 5%, yang artinya terdapat pengaruh positif antara teknologi informasi (H2) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y).

Pemanfaatan TI, khususnya dalam penyelenggaraan tata kelola informasi dan transaksi elektronik, memegang peranan penting untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam struktur administrasi yang lebih berkembang ke daerah dan mempercepat pelaksanaan e-government (Hamzah, 2009). Perubahan contoh perencanaan laporan keuangan daerah dari manual yang dipandang tidak efektif, produktif dan solid yang dipandang kurang tepat, sehingga pemanfaatan TI dalam pelaporan keuangan daerah sangat diperlukan untuk terciptanya efisiensi, efektifitas dan keandalan.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah

dilakukan oleh Firdaus, Nadirsyah dan Fahlevi (2015) serta Warih Komarasari (2017), yang menyatakan bahwa teknologi informasi (TI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan No. 60 Tahun 2008 menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh karyawan guna menciptakan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari hasil olah data atau dari analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa b_3 adalah 0,286 yang dimana dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang positif antara sistem pengendalian internal pemerintah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dimana hasil dari olah data menggunakan regresi juga menunjukkan nilai sig. = 0,000 dengan Level of Significant = 5%, yang berarti terdapat pengaruh positif antara sistem pengendalian internal pemerintah (H3) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y).

Seperti yang ditunjukkan oleh Mahaputra dan Putra (2014) Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan melalui unsur-unsur sistem pengendalian internal dengan penguatan pengawasan, pemisahan tugas yang jelas, pendelegasian wewenang, dokumentasi atas

transaksi, pencatatan yang akurat serta melakukan pengujian sistem pengendalian internal yang sudah ada guna mencapai kualitas dari laporan keuangan yang baik.

Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan. Pengendalian Internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku (Maksyur, 2015). Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin baik sistem pengendalian internal maka akan semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Mahaputra dan Putra (2014), Rahmadani, S (2015), dan Maksyur, N.V. (2015) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan pedoman di dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman bagi instansi pemerintah yang telah diatur pada Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Penerapan SAP ini

diyakini akan meningkatkan kualitas dari pelaporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah.

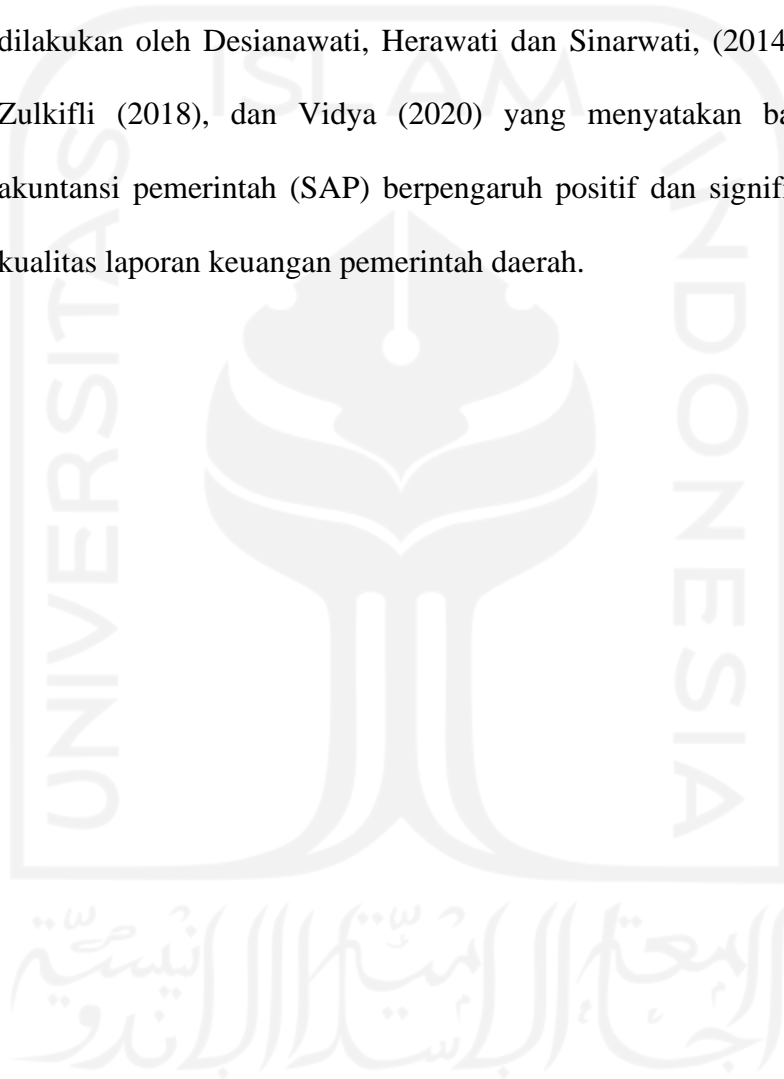
Berdasarkan hasil dari analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa b_4 adalah 0,093 yang artinya hubungan antara teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memiliki hubungan positif. Di mana hasil dari pengolahan data yang dilakukan dengan regresi juga menunjukkan nilai $\text{sig.} = 0,026$ dengan $\text{Level of Significant} = 5\%$, yang artinya terdapat pengaruh positif antara standar akuntansi pemerintah (H4) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y).

Standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan acuan dalam menyusun laporan keuangan. Sehingga standar akuntansi keuangan merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Apabila standar akuntansi pemerintahan telah dipahami dengan baik, maka akan dapat disajikan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dengan benar. Kualitas laporan keuangan daerah yang baik akan berdampak pula pada tata kelola pemerintahan yang lebih baik (Desianawati, Herawati dan Sinarwati, 2014).

Dengan ini, dapat diketahui bahwa dengan pelaksanaan atau penerapan standar akuntansi pemerintahan yang baik maka akan diikuti dengan peningkatan kualitas dari laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri. Untuk situasi ini, laporan keuangan yang sudah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang dapat diketahui yaitu relevan,

adnal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Pelaksanaan prinsip standar akuntansi pemerintah diharapkan akan dapat meminimalisir kesalahan dan juga kecurangan pada tata kelola keuangan daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Desianawati, Herawati dan Sinarwati, (2014), Rahwah & Zulkifli (2018), dan Vidya (2020) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah (SAP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan mengenai analisis faktor-faktor yang memengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi atau semakin berkompeten sumber daya manusia maka kualitas dari laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin meningkat.
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik pemanfaatan teknologi informasi serta semakin lengkap sarana yang terkait dengan teknologi informasi maka kualitas dari laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin meningkat.
3. Sistem Pengendalian Internal pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya sistem pengendalian internal pemerintah maka akan meningkatkan pula kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah itu sendiri.
4. Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini

menunjukkan bahwa semakin meningkatnya pemahaman serta penerapan standar akuntansi pemerintah maka akan semakin baik dan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

5.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan masukan terkait dengan kualitas sumber daya manusia di lingkungan kerja pemerintah daerah. Adanya pelatihan yang berkaitan dengan bidang kerja masing-masing pegawai akan dapat meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dapat menjadi faktor penunjang dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja. Memaksimalkan pemanfaatan dari sistem pengendalian internal pemerintah serta memaksimalkan penerapan standar akuntansi pemerintah secara tepat dan lengkap akan menciptakan peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

5.3 Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan-keterbatasan yang menjadi hambatan dalam proses penelitian ini. Hal tersebut di antaranya adalah dalam pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner memerlukan waktu yang lebih lama dari perkiraannya karena kesibukan responden. Selain itu pengumpulan data dilakukan saat masih terjadi pandemi virus Covid-19, sehingga instansi pemerintahan membatasi kunjungan dari pihak luar.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan memperluas lingkup objek penelitian yang digunakan, serta menambah periode penelitian agar sampel penelitian lebih besar dan mendapatkan hasil yang lebih baik.
2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah/menggunakan variabel potensial lainnya yang diduga dapat mendukung kualitas laporan keuangan pemerintah daerah seperti komitmen organisasi, pendidikan kepala daerah, anggaran pemerintah daerah, dan lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Anwar Prabu Mangkunegara. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- A.A. Anwar Prabu Mangkunegara. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Adi, I. W. A., Suardikha, I. M. S., & Putri, I. G. A. M. A. D. 2017. Pengaruh komitmen organisasi, budaya organisasi dan kepuasan pengguna SIMDA pada kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 6(6), 2587-2616.
- Adhivinna, V. V., & Hikmahwati, A. N. 2020. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Gunungkidul). *Akmenika: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 17(1)
- Aniftahudin. 2016. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *JOM Fekon, Vol. 3 No. 1*. 935-948.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2020. Profil Mitra Kerja Perwakilan BPKP DIY. <http://www.bpkp.go.id/diy/konten/1857/Mitra-Kerja>.
- Bastian, I. 2010, Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar, Erlangga
- Bergman, Michael and Jan-Erik, L. 1990. Public Policy in A Principal-Agent Framework, *Journal of Theoretical polotics*, 2(3): 339-352.
- Desianawati, K., N.T, Herawati dan N.K, Sinarwati. 2014. Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Jurnal SI Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Vol 2 No 1*.
- Diani, I. D. 2014. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Infromasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan (Fahlevi, 2015) (Hamzah, 2009) Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Universitas Negeri Padang.
- Fahlevi, H, Nadirsyah dan Firdaus. 2015. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Kenijakan Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Universitas Syiah Kuala*. Vol. 4 No 1.
- Ghozali, I. 2011. Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 68.
- Ghozali, I. 2013. Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 21. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Ghozali, I. 2018. Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamzah, A. 2009. Pengaruh Ekspektasi Kinerja, Ekspektasi Usaha, Faktor Sosial, Kesesuaian Tugas Dan Kondisi Yang Memfasilitasi Pemakai Terhadap Minat Pemanfaatan Sistem Informasi (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten di Pulau Madura). Simposium Nasional Sistem Teknologi Informasi. UGM
- Haza, I. I. 2014. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah kota padang). 4-7.
- Hervesi, A. 2005. Standar For Internal Control in New York state Government. <http://www.osc.state.ny.us>.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of financial economics*, 3(4), 305-360.
- Komarasari, W. 2017. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah. *Skripsi*. Universitas PGRI Yogyakarta.
- Kombong, R. 2017. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasa Laporan Keuangan Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Mahaputra, I. P.U dan Putra, I.W. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 8, 230-244.
- Mahmudi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Cetakan Pertama. UII Press, Yogyakarta.
- Maksyur, N. V. 2015. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Sistem Penegndalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu). *Jurnal JOM FEKON Vol.2 No 2. Universitas Riau*.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Nadir, R., & Hasyim, H. 2017. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (Studi Empiris Di Pemda Kabupaten Barru). *Akuntabel*, 14(1), 57-68.
- Nazaruddin, Ietje dan Basuki. 2011. Analisis Statistik dengan SPSS Yogyakarta. Danisa Media.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Putra, W.E. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu Vol. 10 No. 2*, 282-293.

Putri, C.M. 2020. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan Keuangan Daerah, Sistem Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pengendalian Intern dan Sumber Daya Manusia Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. *Skripsi*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Putri, A. K. 2020. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada OPD Di Provinsi DIY. *Skripsi*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Rahmadani, S. 2015. Pengaruh Kecanggihan Teknologi Informasi, Partisipasi Manajemen Dan Pengetahuan Manajer Akuntansi Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi (Studi pada Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis di Bandung) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi Unpas)

Rahwah, K & Zulkifli. 2018. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. *Jurnal Kajian Bisnis Vol. 26, No. 2*. 113-120

Samsudin, Sadili. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Pustaka Setia

Setiawan, Budi. 2015. Teknik Praktis Analisis Data Penelitian Sosial & Bisnis Dengan SPSS. Yogyakarta: CV Andi Offset

- Setyowati, L., Isthika, W., & Pratiwi, R. D. 2016. Faktor-faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
- Sudiarianti, N.M. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya Pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Thesis. Universitas Udayana.
- Suhardjo, Yohanes. 2019. Faktor-faktor Yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi Kasus Pemerintah Kota Semarang). *Majalah Ilmiah Solusi Vol. 17, No 4 Oktober 2019*.1-22.
- Suharto, A. A. 2012. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen dan Motivasi terhadap Kinerja Pegawai Pada Inspektorat Kabupaten Kediri. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 1(3), 67-79.
- Sunyoto, D. 2013. Metodologi Penelitian Akuntansi. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi.
- Sutarman. 2013. Pengantar Teknologi Informasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Trisna D.E, M. Dimiyati, & H. Paramu. 2017. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Laporan Keuangan Dengan Mediasi Penatausahaan Aset Tetap. *Jurnal Bisnis dan manajemen vol 11*. 271-282.
- Umar, H. 2011. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Wardani, D. K. & Andriyani, I. 2017. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi*, 88-98/
- Wardani, D. K. & Marlinawati. 2018. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa. *Jurnal Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 26(2).
- Wauriasih, A. 2019. Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Manokwari). *Jurnal Fokus Ekonomi. Vol. 14 No 1 Juni 2019* : 17 - 41.
- Welly & Seputra, R. 2019. Faktor Penentu Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal akuntanika*, Vol. 5, No. 2 , Juli – Desember 2019. 78-90.

Winidyaningrum, C. (2009). Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda subosukawonosraten) (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University))

Yuliani, N. L., & Agustini, R. D. 2016. Faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 14(1), 56-64.

Zulganef. 2006. *Pemodelan Persamaan Struktur dan Aplikasinya menggunakan AMOS 5*. Bandung : Pustaka



LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin dan Keterangan Penelitian



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 883087, 885376;
F. (0274) 882589
E. fe@uii.ac.id
W. fecon.uui.ac.id

Nomor : 2600/DEK/10/Div.URT/X/2021
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth
Pimpinan
BKAD Pemerintah Kabupaten Sleman

Assalamu alaikum wr.wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami di bawah ini :

Nama : Rachmat Nur Eka Pratama
No. Mahasiswa : 17312345
Tempat/Tanggal Lahir : Bengkulu / 25 November 1998
Program Studi : Akuntansi
Jenjang : Strata I (S1)
Alamat : Kranon, Kepek, Wonosari

Bermaksud mohon keterangan/data pada Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

"Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada OPD D.I Yogyakarta)"

Dosen Pembimbing : Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA.

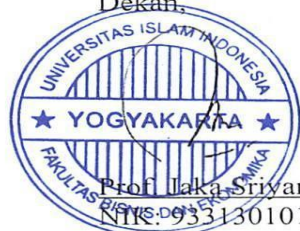
Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Oktober 2021

Dekan,



Prof. Ika Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D.
NIP. 933130101



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 883087, 885376;
F. (0274) 882589
E. fe@uii.ac.id
W. fecon.uui.ac.id

Nomor : 2631/DEK/10/Div.URT/XI/2021
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth
Pimpinan
BKAD Kabupaten Bantul

Assalamu alaikum wr.wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami di bawah ini :

Nama : Rachmat Nur Eka Pratama
No. Mahasiswa : 17312345
Tempat/Tanggal Lahir : Bengkulu / 25 November 1998
Program Studi : Akuntansi
Jenjang : Strata I (S1)
Alamat : Kranon, Kepek, Wonosari

Bermaksud mohon keterangan/data pada Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

"Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada OPD D.I. Yogyakarta)"

Dosen Pembimbing : Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA.

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 01 November 2021
Dekan,



Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D.
NIK. 953130101



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 883087, 885376;
F. (0274) 882589
E. fe@uii.ac.id
W. fecon.uui.ac.id

Nomor : 2586/DEK/10/Div.URT/X/2021
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth
Pimpinan
BKAD Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

Assalamu alaikum wr.wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami di bawah ini :

Nama : Rachmat Nur Eka Pratama
No. Mahasiswa : 17312345
Tempat/Tanggal Lahir : Bengkulu / 25 November 1998
Program Studi : Akuntansi
Jenjang : Strata 1 (S1)
Alamat : Kranon, Kepek, Wonosari

Bermaksud mohon keterangan/data pada Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

"Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada OPD D.I. Yogyakarta)"

Dosen Pembimbing : Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFA.

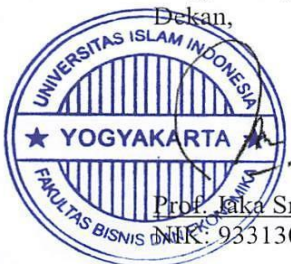
Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 26 Oktober 2021

Dekan,



Prof. Ika Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D.
NIDK: 933130101



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 883087, 885376;
F. (0274) 882589
E. fe@uii.ac.id
W. fecon.uii.ac.id

Nomor : 2935/DEK/10/Div.URT/XII/2021
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth
Pimpinan
BKAD Kota Yogyakarta

Assalamu alaikum wr.wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami di bawah ini :

Nama : Rachmat Nur Eka Pratama
No. Mahasiswa : 17312345
Tempat/Tanggal Lahir : Bengkulu / 25 November 1998
Program Studi : Akuntansi
Jenjang : Strata 1 (S1)
Alamat : Kranon, Kepek, Wonosari

Bermaksud mohon keterangan/data pada Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

"Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)"

Dosen Pembimbing : Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFA.

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 03 Desember 2021

Dekan,



Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D.
NIK: 933130101



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Ace Partadiredja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. (0274) 881546, 883087, 885376;
F. (0274) 882589
E. fe@uii.ac.id
W. fecon.uui.ac.id

Nomor : 2936/DEK/10/Div.URT/XII/2021
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth
Pimpinan
BKAD Kabupaten Kulonprogo

Assalamu alaikum wr.wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami di bawah ini :

Nama : Rachmat Nur Eka Pratama
No. Mahasiswa : 17312345
Tempat/Tanggal Lahir : Bengkulu / 25 November 1998
Program Studi : Akuntansi
Jenjang : Strata 1 (S1)
Alamat : Kranon, Kepek, Wonosari

Bermaksud mohon keterangan/data pada Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

"Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)"

Dosen Pembimbing : Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA.

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 03 Desember 2021

Dekan,



Prof. Ika Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D.
NIK. 933130101



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦠꦸꦭꦠꦶꦩꦼꦂꦶꦠꦶꦁ

Jln. Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon./Fax (0274) 368548, Kode Pos 55711

Email bkad@bantulkab.go.id Website <http://www.bkad.bantulkab.go.id>

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, menyatakan bahwa :

Nama : Rachmat Nur Eka Pratama

NIM : 17312345

Program Studi : Akuntansi

Universitas : Universitas Islam Indonesia

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya nama mahasiswa tersebut BENAR telah melaksanakan penelitian di BKAD Kabupaten Bantul pada tanggal 1 November 2021, dengan Judul Penelitian "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Infotmasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)".

Dengan surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Kepala BKAD Kabupaten Bantul, ←

DETI TRISNA MANURUNG, MSi
NIP. 19711230 199603 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦫꦺꦒꦺꦴꦏꦏꦏꦧꦏꦁꦏꦺꦴꦗꦁꦤꦺꦴꦩꦏꦏꦺꦴꦁꦤ꧀ꦢꦔꦫꦺꦴꦩꦏꦏꦺꦴꦁꦤ꧀ꦢꦔꦫꦺꦴꦩꦏ

Alamat : Jalan Perwakilan Nomor 1, Wates, Kulon Progo
Telp : (0274) 773221, Fax : (0274) 773221

Website : <https://bkad.kulonprogokab.go.id/>, Email : bkad@kulonprogokab.go.id

Nomor : 070 / 1001
Sifat : Biasa
Lampiran :-
Hal : Jawaban Ijin Penelitian

Wates, 6 Desember 2021
Yth. Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
UII Yogyakarta
di
YOGYAKARTA

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta Nomor : 2936/DEK/10/Div.URT/XII/2021 tanggal 03 Desember 2021 perihal seperti pada pokok surat di atas, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dengan rencana kegiatan **penelitian** dari Mahasiswa a.n. Rachmat Nur Eka Pratama No. Mahasiswa : 17312345 Program Studi : Akuntansi dengan Judul Skripsi : "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)".
2. Memperhatikan Permendagri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian disampaikan bahwa : penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir pendidikan/sekolah dari tempat pendidikan/sekolah di dalam negeri **tidak diperlukan ijin** pengumpulan data (penelitian).
3. Sehubungan dengan poin no. 1 s.d 2 di atas, dimohon pelaksanaan pengumpulan data/penelitian dimaksud tetap berkoordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Instansi terkait lainnya untuk menjaga kelancaran kegiatan tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Kepala
Sekretaris
u.b.

Ka. Subbag Humas dan Kepegawaian



KRISTINA MURNI, S.I.P.
(Penata ; III/c)

NIP. 19791226 201001 2 015



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Brigjen Katamsa 1 Wonosari - Gunungkidul - Yogyakarta 55812
telepon: (0274) 391083 faksimili: (0274) 391164
posel: bkad@gunungkidulkab.go.id laman: bkad.gunungkidulkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: 070/ 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : SIGIT WIJAYANTO, S.Sos.MM
NIP : 197110211998031008
Pangkat/Gol. : Pembina, IV/a
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Gunungkidul

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : RACHMAT NUR EKA PRATAMA
NIM : 17312345
Program Studi: S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta.

telah melaksanakan kegiatan Penelitian pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 26 Oktober 2021, dengan Judul Penelitian "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)".

Demikian keterangan ini diberikan dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Wonosari
Pada tanggal : 7 Desember 2021

a.n KEPALA,
Sekretaris,
Sub Bagian Umum,



SIGIT WIJAYANTO, S.Sos.MM
Pembina, IV/a
NIP. 197110211998031008



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 866039, Faksimile (0274) 866039, (PABX) 868405 psw. 1444
E-mail: bkad@slemankab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070/2714

Yang dibawah ini :

Nama : RACHMAT NUR EKA PRATAMA
NIM : 17312345
Jurusan/Prodi : AKUNTANSI / FAKULTAS BISNIS
Kampus : UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (UII)

Telah melakukan kegiatan Pelaksanaan Survei/Penelitian di Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman sebagai bahan dalam pembuatan Skripsi dengan judul "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH". Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 06 Desember 2021

Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

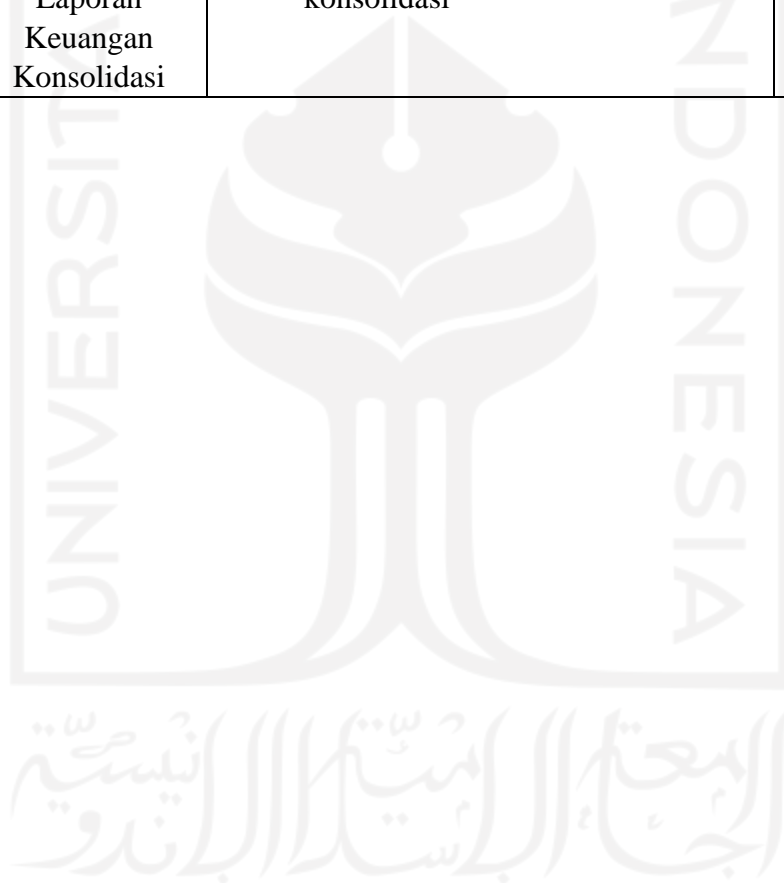


Lampiran 2 : Operasional Variabel

	Variabel	Indikator	Indikator	Sumber
1	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Relevan	1) Menyusun laporan Keuangan sesuai SAP 2) <i>Feedback value</i> 3) Tepat waktu	PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan (Sudiarianti 2015)
		2. Andal	4) Memenuhi kebutuhan pengguna 5) Penyajian jujur	
		3. Dapat dibandingkan	6) Dapat dibandingkan 7) Menggunakan pedoman	
		4. Dapat dipahami	8) Disusun secara sistematis 9) Disusun dengan jelas sehingga dapat dipahami	
2	Kompetensi Sumber Daya Manusia	1. Pengetahuan	1) Pemahaman siklus akuntansi 2) Upgrade pengetahuan dibidang akuntansi	PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan (Sudiarianti 2015)
		2. Kererampilan	3) Kemampuan menyusun dan menyajikan LRA, Neraca, LAK dan CALK 4) Kemampuan menyusun dan menyajikan laporan perubahan saldo anggaran operasional dan laporan perubahan ekuitas	
		3. Sikap	5) Mengedepankan etika dan kode etik akuntansi 6) Menolak intervensi	

3	Pemanfaatan Teknologi Informasi		<ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki sarana (komputer) 2) Jaringan internet 3) Pemanfaatan jaringan internet 4) Komputerisasi proses akuntansi 5) Pengolahan data menggunakan software 6) Sistem informasi terintegrasi 7) Pemeliharaan peralatan teratur 8) Pendataan peralatan yang rusak guna perbaikan 	PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan dan (Desmiyati 2014)
4	Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	<p>Lingkungan Pengendalian</p> <p>Penilaian Risiko</p> <p>Kegiatan Pengendalian</p> <p>Infomasi dan Komunikasi</p> <p>Pemantauan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pimpinan melakukan pemeriksaan 2) Memiliki standar kompetensi 3) Pimpinan melakukan analisis risiko 4) Memiliki rencana pengelolaan 5) Kebijakan pengamanan asset 6) Transaksi yang telah diotorisasi 7) Infromasi tepat waktu dan efektif 8) Meyampaikan Surat Pertanggungjawaban tepat waktu 9) Perbaikan pengendalian internal 10) Mengevaluasi temuan 	PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan dan (Sudiarianti 2015)
5	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	<p>PSAP No. 1 Penyajian Laporan Keuangan</p> <p>PSAP No. 2 Laporan Realisasi Anggaran</p> <p>PSAP No. 3 Laporan Arus Kas</p> <p>PSAP No. 4 Catatan atas Laporan Keuangan</p> <p>PSAP No. 5 Akuntansi Persediaan</p> <p>PSAP No. 6 Akuntansi Investasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 11) Komponen laporan keuangan 12) Berbasis Akrual 13) Metode langsung dalam pelaporan 14) Penyusunan dan penyajian CaLK 15) Pengakuan persediaan 16) Pengakuan investasi 	PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan (Sudiarianti 2015)

	PSAP No.7 Akuntansi Aset Tetap	17) Penilaian dan pencatatan aset tetap	
	PSAP No. 8 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan	18) Pengungkapan informasi konstruksi dalam pengerjaan	
	PSAP No. 9 Akuntansi Kewajiban	19) Pencatatan kewajiban	
	PSAP No. 10 Koreksi Kesalahan	20) Perlakuan akuntansi koreksi kesalahan	
	PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasi	21) Penyajian laporan keuangan konsolidasi	



Lampiran 3 : Kuesioner

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner

Lampiran : Kuesioner Penelitian

Kepada Yth. Bapak/Ibu Pegawai

Badan Keuangan dan Aset Daerah

Di Kabupaten/Kota....

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyusunan skripsi Program Studi Akuntansi Universitas Islam Indonesia, Bersama ini Saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi kuesioner dalam rangka penelitian Saya yang berjudul "Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada OPD D.I. Yogyakarta)". Kontribusi yang Bapak/Ibu berikan akan sangat bermanfaat, bagi penelitian, Pemerintah, maupun pengembangan ilmu Akuntansi Pemerintahan dan Keuangan Daerah. Adapun identitas dari peneliti:

Nama : Rachmat Nur Eka Pratama

NIM : 17312345

Fakultas/Prodi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi

Peneliti menyadari sepenuhnya, adanya kuesioner ini mengganggu aktivitas Bapak/ Ibu yang padat. Namun dengan segala kerendahan hati, peneliti mohon kiranya Bapak/ Ibu berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini hanya untuk keperluan skripsi, tidak untuk dipublikasikan secara luas, sehingga kerahasiaan data yang diisi dapat dijaga.

Akhir kata Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu yang telah meluangkan waktunya dalam pengisian kuesioner ini.

Wassalamuallaikum wr.wb

Mengetahui
Dosen pembimbing

Hormat Saya,

Johan Arifin, SE, M.Si, Ph.D., CFrA

Rachmat Nur Eka Pratama

A. Identitas Responden

Untuk keperluan validitas jawaban kuesioner dan analisis data, kami memerlukan jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i sebagai responden. Dimohon Bapak/Ibu berkenan mengisi identitas berikut atau memberi tanda *check list* (☐) pada kotak yang tersedia.

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Perempuan
3. Usia :
4. Pendidikan terakhir : SMP/SMA Diploma
 S1 S2 S3
5. Latar Belakang Pendidikan
- | | |
|------------------|--------------------------|
| a. Akuntansi | <input type="checkbox"/> |
| b. Manajemen | <input type="checkbox"/> |
| c. Ilmu Ekonomi | <input type="checkbox"/> |
| d. Hukum | <input type="checkbox"/> |
| e. Teknik | <input type="checkbox"/> |
| f. Dan lain-lain | <input type="checkbox"/> |
6. Jabatan :
7. Masa Kerja ;
8. Bagian di BKAD :

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Pengisian kuesioner dilakukan oleh pegawai bidang keuangan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
2. Sebelum menjawab kuesioner, mohon untuk melengkapi identitas responden dengan mengisikan nama, jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan lama bekerja
3. Cara pengisian kuesioner adalah
 - a. Semua pernyataan dijawab dengan cara memberikan tanda (√) pada salah satu jawaban yang tersedia dan paling tepat menurut persepsi Bapak/Ibu/Sdr(i).
 - b. Tidak ada benar atau salah dalam memberikan jawaban karena kami hanya memperhatikan pada suatu angka atau jawaban yang menunjukkan persepsi terbaik dari Bapak/Ibu/Sdr(i).
4. Terdapat beberapa pilihan pernyataan, yaitu:
 - STS : Sangat Tidak Setuju
 - TS : Tidak Setuju
 - N : Netral
 - S : Setuju
 - SS : Sangat Setuju

PERHATIAN: Anda diharapkan hanya mengisi "N" (Netral) jika Anda memang tidak mengetahui sama sekali pernyataan yang diajukan, atau Anda belum pernah mengalami situasi/kondisi dalam pernyataan yang diajukan.

Daftar Pernyataan Tentang Kualitas Laporan Keuangan						
No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
	Relevan					
1.	Laporan keuangan yang disusun sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan informasi yang lengkap mencakup semua informasi					

	akuntansi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.					
2.	Laporan keuangan yang disusun selesai secara tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan saat ini.					
3.	Laporan keuangan yang disusun dapat digunakan untuk mengoreksi keputusan masa lalu (<i>feedback value</i>).					
Andal						
4.	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan telah benar dan memenuhi kebutuhan para pengguna dan tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu sehingga teruji kebenarannya.					
5.	Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya sehingga bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material.					
Dapat Dibandingkan						
6.	Informasi yang termuat dalam laporan keuangan yang saya susun selalu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.					
7.	Dalam penyusunan laporan keuangan, saya telah menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada SAP dari tahun ke tahun.					
Dapat Dipahami						
8.	Laporan yang saya buat disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti dan dipahami.					

9.	Informasi yang saya sajikan dalam laporan keuangan telah jelas dan disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.					
----	--	--	--	--	--	--

Sumber: Ni Made Sudiarianti, dkk (2015)

Daftar Pernyataan tentang Kompetensi SDM						
No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
Pengetahuan (<i>Knowledge</i>)						
1.	Saya memahami PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP, PP No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan siklus akuntansi dengan baik					
2.	Saya sering membaca literatur berupa jurnal akuntansi dan buku-buku akuntansi dalam rangka meng- <i>Upgrade</i> pengetahuan saya dibidang akuntansi.					
Keterampilan (<i>Skill</i>)						
3.	Saya mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010					
4.	Saya selalu mengikuti pelatihan terkait dengan penatausahaan laporan keuangan					
Sikap (<i>Attitude</i>)						
5.	Saya selalu bekerjaberdasarkan praktik yang dapat diterima secara umum dengan mengedepankan etika dan kode etik sebagai seorang akuntan					
6.	Saya selalu menolak setiap intervensi dari atasan yang dapat menimbulkan pelanggaran					

	terhadap peraturan					
--	--------------------	--	--	--	--	--

Sumber: Ni Made Sudiarianti, dkk (2015).

Daftar Pernyataan tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi						
No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Setiap Sub-bidang pada BKAD memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas.					
2.	Jaringan internet telah terpasang di unit kerja anda.					
3.	Jaringan internet telah dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan.					
4.	Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi.					
5.	Pengolahan data transaksi keuangan menggunakan software yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.					
6.	Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi.					
7.	Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur.					
8.	Peralatan yang usang/rusak didata dan diperbaiki tepat pada waktunya.					

Sumber: Instrumen dikembangkan dalam penelitian Desmiyati (2014)

Daftar Pernyataan tentang Penerapan SPIP						
No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
Lingkungan Pengendalian						
1.	Pimpinan BKAD selalu melakukan pemeriksaan terhadap catatan akuntansi, fisik kas, barang, dan secara terus menerus melakukan penilaian terhadap kualitas pengendalian intern					
2.	BKAD telah memiliki stándar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi.					
Penilaian Risiko						
3.	Pimpinan telah melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap sistem akuntansi.					
4.	Pimpinan selalu memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi.					
Kegiatan Pengendalian						
5.	Kebijakan maupun prosedur pengamanan fisik atas asset telah ditetapkan dengan baik dan pengeluaran uang pada BKAD selalu didokumentasikan pada bukti pengeluaran kas					
6.	Instansi Pemerintah telah mengembangkan rencana untuk identifikasi maupun pengamanan atas asset infrastruktur dan semua transaksi yang diproses kedalam komputer adalah transaksi yang telah diotorisasi					
Informasi dan Komunikasi						
7.	Informasi telah disediakan secara tepat waktu					

	dan saluran komunikasi telah dilaksanakan secara efektif					
8.	Pengguna anggaran/pemegang kas pada masing-masing SKPD telah menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat pada waktunya.					
Pemantauan						
9.	BKAD selalu menindaklanjuti setiap hasil temuan/reviu maupun saran yang diberikan oleh BPK/Inspektorat, dan sebagai tindak lanjut dari penilaian terhadap kualitas pengendalian intern, BKAD melakukan perbaikan pengendalian intern					
10.	Pimpinan selalu mereviu dan mengevaluasi temuan yang menunjukkan adanya kelemahan dan perlu perbaikan					

Sumber: Ni Made Sudiarianti, dkk (2015).

Daftar Pernyataan tentang Penerapan SAP						
No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
PSAP No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan						
1.	Penyusunan laporan keuangan pada instansi tempat Saya bekerja telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.					
PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran						
2.	Saya selalu menyusun dan menyajikan laporan realisasi anggaran menggunakan akuntansi berbasis akrual, dan mencatat pendapatan berdasarkan asas bruto					

PSAP No. 03 tentang Laporan Arus Kas (LAK)						
3.	Saya selalu menyusun dan menyajikan LAK sesuai dengan SAP, dan menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi					
PSAP No. 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan						
4.	Saya selalu menyajikan informasi secara lengkap tentang penjelasan pos-pos dalam laporan keuangan pada setiap periode pelaporan.					
PSAP No. 05 tentang Akuntansi Persediaan						
5.	Saya selalu melakukan pencatatan dan pengakuan persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi.					
PSAP No. 06 tentang Akuntansi Investasi						
6.	Saya selalu melakukan pengakuan kas yang telah dikeluarkan sebagai investasi setelah manfaat ekonomi potensi di masa yang akan datang dapat diperoleh dan nilai perolehan investasi dapat diukur.					
PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap						
7.	Saya selalu mencatat/menilai aset tetap sebesar biaya perolehannya dan mengklasikan aset tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam operasi entitas					
PSAP No. 08 tentang Akuntansi Kontruksi dalam Pengerjaan						
8.	Saya selalu mengungkapkan informasi konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi dan memindahkan konstruksi					

	dalam pengerjaan ke aset tetap yang bersangkutan					
PSAP No. 09 tentang Akuntansi Kewajiban						
9.	Saya selalu mencatat kewajiban sebesar nilai nominal dan mengakui kewajiban pada saat kewajiban timbul					
PSAP No. 10 tentang Koreksi Kesalahan						
10.	Saya selalu mengoreksi kesalahan melalui pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan berdasarkan SAP					
PSAP No. 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi						
11.	Laporan keuangan konsolidasi pada pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan selalu mencakup laporan keuangan dari semua entitas akuntansi					

Sumber: Ni Made Sudiarianti, dkk (2015)

Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pearson Correlation	.736*	.638*	.669*	.769*	.698*	.719*	.616*	.595*	.745*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	89	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	89	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.913	6

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	Kompetensi Sumber Daya Manusia
X1.1	Pearson Correlation	1	.687**	.680**	.524**	.676**	.564**	.816**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	89	89	89	89	89	89	89
X1.2	Pearson Correlation	.687**	1	.744**	.554**	.805**	.665**	.873**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	89	89	89	89	89	89	89
X1.3	Pearson Correlation	.680**	.744**	1	.669**	.725**	.670**	.890**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	89	89	89	89	89	89	89
X1.4	Pearson Correlation	.524**	.554**	.669**	1	.514**	.585**	.782**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	89	89	89	89	89	89	89

	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	89	89	89	89	89	89	89	89	89
X2.3	Pearson Correlation	.376*	.610*	1	.413*	.510*	.297*	.066	.260*	.621**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.005	.537	.014	.000
	N	89	89	89	89	89	89	89	89	89
X2.4	Pearson Correlation	.312*	.547*	.413*	1	.611*	.451*	.257*	.316*	.723**
	Sig. (2-tailed)	.003	.000	.000		.000	.000	.015	.003	.000
	N	89	89	89	89	89	89	89	89	89
X2.5	Pearson Correlation	.187	.557*	.510*	.611*	1	.431*	.239*	.198	.671**
	Sig. (2-tailed)	.079	.000	.000	.000		.000	.024	.062	.000
	N	89	89	89	89	89	89	89	89	89
X2.6	Pearson Correlation	.250*	.397*	.297*	.451*	.431*	1	.260*	.462*	.643**
	Sig. (2-tailed)	.018	.000	.005	.000	.000		.014	.000	.000
	N	89	89	89	89	89	89	89	89	89
X2.7	Pearson Correlation	.323*	.509*	.066	.257*	.239*	.260*	1	.724*	.652**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.537	.015	.024	.014		.000	.000
	N	89	89	89	89	89	89	89	89	89
X2.8	Pearson Correlation	.337*	.423*	.260*	.316*	.198	.462*	.724*	1	.705**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.014	.003	.062	.000	.000		.000
	N	89	89	89	89	89	89	89	89	89
Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pearson Correlation	.600*	.827*	.621*	.723*	.671*	.643*	.652*	.705*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	89	89	89	89	89	89	89	89	89
<p>** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).</p> <p>* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).</p>										

Reliability
Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	89	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	89	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.915	10

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	X3.9	X3.10	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
X3.1	Pearson Correlation	1	.498**	.664**	.382**	.517**	.513**	.443**	.323**	.453**	.529**	.709**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.002	.000	.000	.000
	N	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
X3.2	Pearson Correlation	.498**	1	.643**	.607**	.626**	.358**	.561**	.488**	.564**	.524**	.780**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000
	N	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
X3.3	Pearson Correlation	.664**	.643**	1	.629**	.633**	.473**	.545**	.401**	.520**	.556**	.806**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
X3.4	Pearson Correlation	.382**	.607**	.629**	1	.665**	.517**	.435**	.375**	.545**	.377**	.728**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
X3.5	Pearson	.517	.626	.633	.665	1	.747	.649	.384	.908	.673	.891**

	Correlation	**	**	**	**		**	**	**	**	**	
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
X3.6	Pearson Correlation	.513**	.358**	.473**	.517**	.747**	1	.489**	.329**	.735**	.522**	.742**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.000	.000		.000	.002	.000	.000	.000
	N	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
X3.7	Pearson Correlation	.443**	.561**	.545**	.435**	.649**	.489**	1	.238*	.638**	.649**	.738**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.025	.000	.000	.000
	N	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
X3.8	Pearson Correlation	.323**	.488**	.401**	.375**	.384**	.329**	.238*	1	.350**	.300**	.569**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.000	.000	.000	.002	.025		.001	.004	.000
	N	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
X3.9	Pearson Correlation	.453**	.564**	.520**	.545**	.908**	.735**	.638**	.350**	1	.755**	.845**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.001		.000	.000
	N	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
X3.10	Pearson Correlation	.529**	.524**	.556**	.377**	.673**	.522**	.649**	.300**	.755**	1	.769**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.004	.000		.000
	N	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Pearson Correlation	.709**	.780**	.806**	.728**	.891**	.742**	.738**	.569**	.845**	.769**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

	tailed)												
	N	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
X4.6	Pearson Correlation	.348**	.543**	.752**	.732**	.740**	1	.750**	.675**	.580**	.587**	.486**	.820**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
X4.7	Pearson Correlation	.276**	.556**	.663**	.648**	.730**	.750**	1	.845**	.730**	.666**	.602**	.856**
	Sig. (2-tailed)	.009	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
X4.8	Pearson Correlation	.223*	.583**	.656**	.639**	.640**	.675**	.845**	1	.745**	.630**	.567**	.828**
	Sig. (2-tailed)	.036	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
X4.9	Pearson Correlation	.205	.491**	.676**	.593**	.572**	.580**	.730**	.745**	1	.562**	.385**	.758**
	Sig. (2-tailed)	.053	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
X4.10	Pearson Correlation	.323**	.781**	.717**	.655**	.789**	.587**	.666**	.630**	.562**	1	.745**	.852**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
X4.11	Pearson Correlation	.230*	.592**	.485**	.430**	.622**	.486**	.602**	.567**	.385**	.745**	1	.701**
	Sig. (2-tailed)	.030	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
Penerapan SAP	Pearson Correlation	.487**	.819**	.902**	.839**	.905**	.820**	.856**	.828**	.758**	.852**	.701**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).													
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).													

Lampiran 6 : Uji Regresi

Regression

Variables Entered/Removed ^a			
Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan SAP, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ^b		Enter

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

b. All requested variables entered.

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.873 ^a	.762	.751	1.603

a. Predictors: (Constant), Penerapan SAP, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	692.512	4	173.128	67.417	.000b
	Residual	215.713	84	2.568		
	Total	908.225	88			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

b. Predictors: (Constant), Penerapan SAP, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.459	2.095		3.561	.001
	Kompetensi Sumber Daya Manusia	.194	.074	.216	2.603	.011
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	.305	.085	.297	3.600	.001
	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	.286	.076	.338	3.762	.000
	Penerapan SAP	.093	.041	.163	2.263	.026

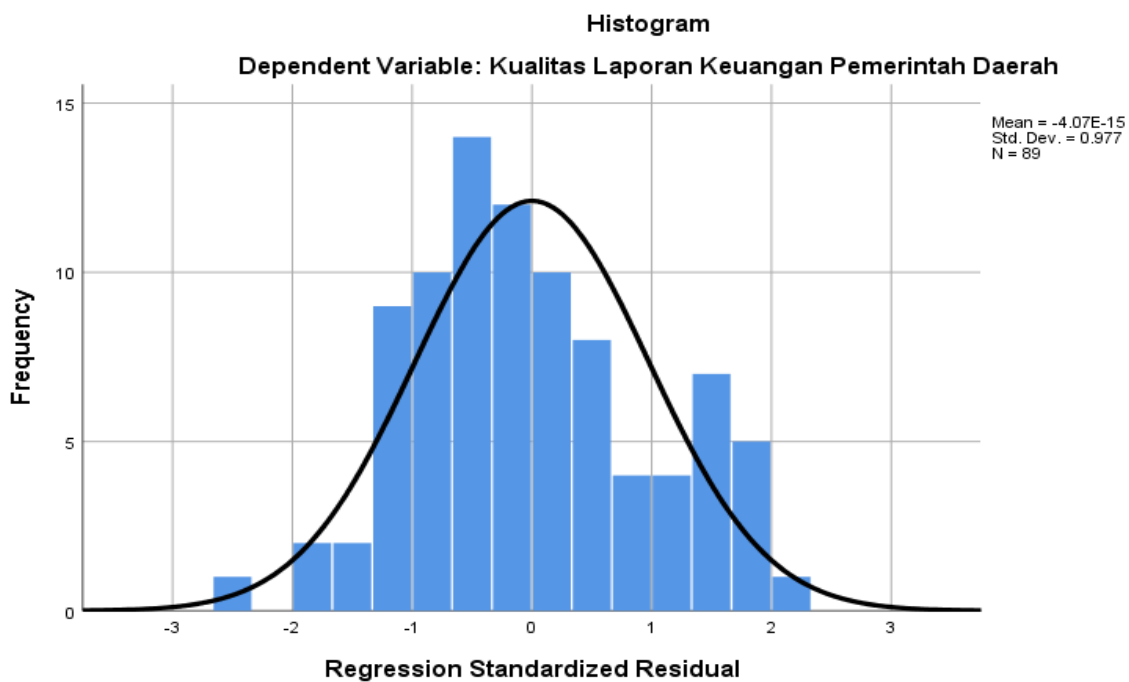
a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

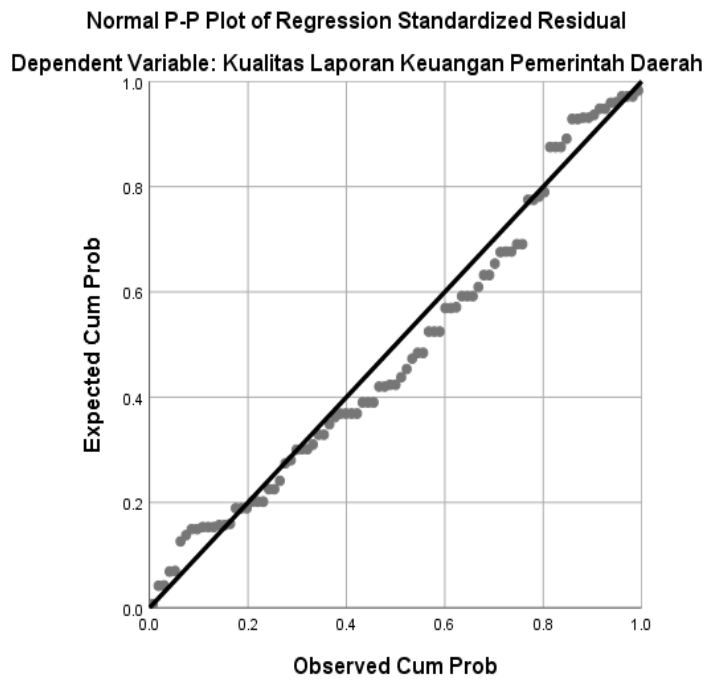
Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.459	2.095		3.561	.001		
	Kompetensi Sumber Daya Manusia	.194	.074	.216	2.603	.011	.411	2.432
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	.305	.085	.297	3.600	.001	.416	2.405
	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	.286	.076	.338	3.762	.000	.351	2.850
	Penerapan SAP	.093	.041	.163	2.263	.026	.544	1.837

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Lampiran 7 : Uji Normalitas

Metode Grafik





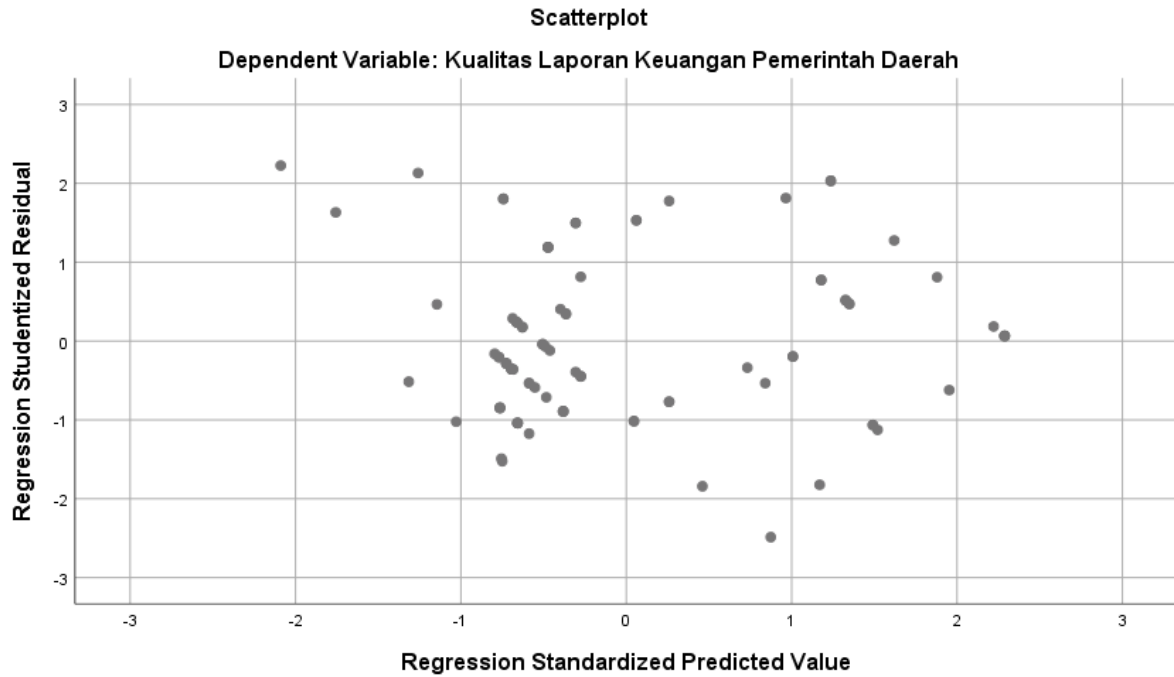
Metode Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
n		89
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.56565699
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.084
	Positive	.084
	Negative	-.079
Test Statistic		.084
Asymp. Sig. (2-tailed)		.166 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

Lampiran 8 : Uji Heteroskedastisitas

Metode Grafik



Metode Glejser

Model		Coefficients ^a		Standardized Coefficients	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Std. Error			
		B		Beta		
1	(Constant)	2.075	1.205		1.722	.089
	Kompetensi Sumber Daya Manusia	.057	.043	.221	1.333	.186
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	.063	.049	.215	1.303	.196
	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	-.065	.044	-.267	-1.486	.141
	Penerapan SAP	-.036	.024	-.220	-1.531	.130

a. Dependent Variable: Abs_Res2